

**ANALISIS PMA DAN PMDN DI JAWA TENGAH
BERDASARKAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA**

TESIS

**Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**



Oleh :

**DJOKO SARWONO
NIM. C4B000106**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

ANALISIS PMA DAN PMDN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN
FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA

Disusun
oleh :

DJOKO SARWONO
NIM. C4B000106

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 26 Januari 2004

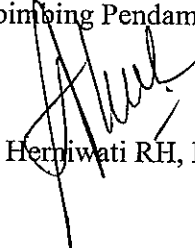
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



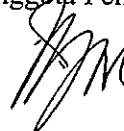
Drs. Wiratno, Mec

Pembimbing Pendamping

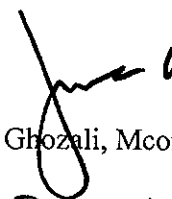


Dra. Hermiwati RH, MS.

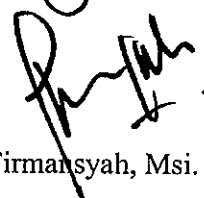
Anggota Penguji



Drs. Bagio Mudakir, MT



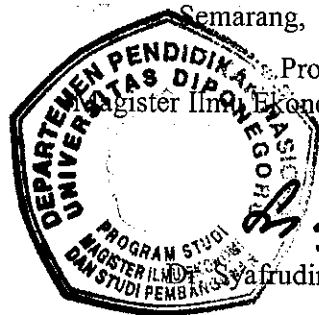
Dr. Imam Ghozali, Mcom, Akt.



Dr. Firmansyah, Msi.

Semarang,

Mei 2004



Program Studi

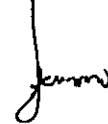
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Yafrudin Budiningharto, SU

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2004



Djoko Sarwono

ABSTRACT

The growth of Central Java economy in the next several years is still expecting the foreign direct investment, since its growth is still slower than the foreign direct investment (PMA) growth in East Java Province, West Java and Jakarta Special Regency as well. This matter was caused by several factors, such as the lack of physical infrastructure, the lack of supporting investment policy, etc. Based on this fact, this study is trying to analyse deeply about the factors affecting to foreign direct investment in Central Java.

The data used in this study are secondary data, which were collected from BKPM, for 35 years periods, namely from 1976 to 2002. To estimate and analyse the variables in this study, beside economic theory, the econometric approach is also adopted by applying regression and correlation. Regression analysis is use to investigate causality between dependent variable with one or more independent variable. Beside that regression analysis use to appraise coefficient regression of data observe.

The result of this study indicates that: First, PDRB per capita Central Java, Total expenditure, Rate of employees salary in Central Java, Inflation and Consumer Price Index (IHK) all of them have an effect on the invesment Central Java; Second, length of roads which have been built in Central Java has no significant effect on the invesment; Third total expenditure has an effect on positive to value of investment; Fourth, rate of employees salary in Central Java have an effect into value of foreign direct investment and domestic direct investment. Fifth, inflation rate have an effect in to value investment in Central Java, sufficient Consumer Price Index with effect on positive to value of invesment in Central Java.

ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam tahun-tahun mendatang masih mengharapkan kehadiran penanaman modal asing karena kenyataan di lapangan kehadiran PMA di Jawa Tengah tumbuh kalah cepat dibanding dengan pertumbuhan PMA di Propinsi Jawa timur, Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena banyak faktor antara lain; kurangnya prasarana fisik yang ada; kurangnya kebijakan investasi yang mendukung dan lain-lain. Atas dasar kenyataan seperti itu, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita Jawa Tengah, panjang jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah, pengeluaran tota, rata-rata upah / gaji karyawan di Jawa Tengah dan tingkat inflasi terhadap tingkat investasi di Jawa Tengah.

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data-data tersebut bersumber dari BKPM, BKPMMD, BPS, Bappeda, JDA, Nota Keuangan Republik Indonesia selama periode penelitian yaitu dari tahun 1967 sampai dengan 2002. Sedangkan untuk menaksir dan menganalisis variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, disamping teori ekonomi, digunakan juga pendekatan ekonometrika yang berupa analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel dependen dengan salah satu atau lebih variabel independen. Disamping itu analisis regresi dapat dipakai untuk menaksir koefisien persamaan regresi dari data pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *pertama* PDRB per kapita Jawa Tengah berpengaruh positif Total Pengeluaran Pemerintah, Rata-rata upah gaji karyawan di Jawa Tengah, Tingkat inflasi dan IHK secara bersama-sama mempengaruhi masuknya investasi di Jawa Tengah. *Kedua* Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dan masuknya investasi. *Ketiga* tidak ada hubungan antara panjang jalan yang telah dibangun dengan investasi di Jawa Tengah. *Keempat* terdapat hubungan negatif namun signifikan antara gaji atau upah pekerja karyawan di Jawa Tengah *Kelima* terdapat hubungan negatif dan signifikan antara tingkat inflasi di Jawa Tengah dengan investasi. Sedangkan IHK yang merupakan prosen pembentukan inflasi justru berpengaruh positif dan signifikan.

KATA PENGANTAR

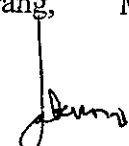
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas karunia, rahmat dan kasih sayang yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul "ANALISIS FAKTOR PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANANAMAN MODAL DALAM NEGERI BERDASARKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA" Penyusunan tesis ini merupakan persyaratan yang ditentukan untuk menyelesaikan Studi pasacasarjana pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun disadari bahwa penelitian ini masih kurang sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. Bapak Syafrudin Budiningharto, SU, selaku Ketua Magister Ilmu dan Studi Pembangunan
2. Bapak Drs. Wiratno, Mec, MS, selaku Pembimbing Utama;
3. Ibu Dra. Herniwati, RH, MS selaku Pembimbing Pendamping;
4. Bapak-bapak penguji yang ikut membantu memberikan sumbang saran serta perbaikan sebagai penyempurnaan dalam penulisan tesis;
5. Bapak Kepala Bappeda yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis;
6. Bapak-bapak pengajar pada Program MIESP UNDIP Semarang serta semua pihak yang turut membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan suka cita penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, Mei 2004


Djoko Sarwono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN KERANGKA PIKIR TEORITIS	10
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 Variabel yang mempengaruhi PMA dan PMDN	11
2.1.2 Investasi.....	12
2.1.3 Resiko Investasi.....	14
2.1.3 Konsep Marginal Efficiency of Capital (MEC)	16
2.1.4 Marginal Efficiency of Investment (MEI).....	19
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	21
2.1.6 Pengeluaran Pembangunan (APBD Propinsi).....	25
2.1.7 Inflasi.....	27
2.1.8 Penyediaan Infrastruktur	31
2.1.9 Upah Dan Gaji Karyawan	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33

2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	33
2.4	Hipotesis	37
BAB III	METODE PENELITIAN.....	38
3.1	Jenis dan Sumber Data	38
3.2	Definisi Operasional Variabel	38
3.3	Teknik Analisis.....	40
3.4	Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.....	42
3.5	Pengujian Parameter Simultan dengan F-test.....	43
3.6	Pengujian Parameter Individu dengan t-test.....	44
BAB IV	GAMBARAN UMUM	45
4.1	Keadaan Wilayah.....	45
4.1.1	PMA Di Jawa Tengah	46
4.1.2	PMDN Di Jawa Tengah	48
4.1.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah ..	50
4.1.4	Panjang Jalan di Jawa Tengah.....	52
4.1.5	Pengeluaran Pembangunan di Jawa Tengah (APBD)	54
4.1.6	Gaji Karyawan di Jawa Tengah.....	56
4.1.7	Inflasi di Jawa Tengah.....	58
BAB V	HASIL DAN ANALISIS	60
5.1.	Uji Penyimpangan Klasik	60
5.1.1	Uji Multikolenearitas	60
5.1.2	Uji Heterokedastisitas.....	61
5.1.3	Uji Autokorelasi.....	62
5.2.	Model Persamaan PMA.....	62
5.2.1	Pengujian Secara Serentak	64
5.2.2	Pengujian Secara Parsial	64
5.3.	Model Persamaan PMDN	68
5.3.1.	Pengujian Secara Serentak	69
5.3.2.	Pengujian Secara Parsial	69
5.4.	Analisis Total PMA dan PMDN.....	72
5.4.1.	Pengujian Secara Serentak	73
5.4.2.	Pengujian Secara Parsial	73

BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal di Indonesia Tahun 1967 s/d 2002	4
Tabel 1.2	Persetujuan PMA Kumulatif dan Peringkat Nilai Investasi menurut Lokasi di Indonesia tahun 2001	5
Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1.	Persyaratan Uji Durbin Watson	43
Tabel 4.1	Investasi PMA di Jawa Tengah Periode 1967 – 2002	47
Tabel 4.2	Investasi PMDN di Jawa Tengah Periode 1967 – 2002.....	49
Tabel 4.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Periode 1967 – 2002	51
Tabel 4.4	Panjang Jalan kelas III di Jawa Tengah Periode 1967 – 2002	53
Tabel 4.5	Pengeluaran Pembangunan di Jawa Tengah Periode 1967 – 2002	55
Tabel 4.6	Gaji Karyawan di Jawa Tengah Periode 1967 – 2002	57
Tabel 4.7	Inflasi di Jawa Tengah Periode 1967 – 2002	59
Tabel 5.1	Perbandingan Nilai R^2	60
Tabel 5.2	Uji Heteroskedastisitas Model PMA	61
Tabel 5.3	Uji Heteroskedastisitas Model PMDN.....	61
Tabel 5.4	Hasil Estimasi PMA.....	63
Tabel 5.5	Hasil Estimasi PMDN.....	68
Tabel 5.6	Hasil Estimasi PMA dan PMDN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurve Fungsi Investasi (MEI).....	19
Gambar 2.2 Hubungan antara MEC dan MEI serta Penawaran modal	20
Gambar 2.3 Grafik teori inflasi.....	30
Gambar 2.4 Grafik Equilibrium Pasar Tenaga Kerja	32
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	36
Gambar 5.1 Hasil Pengujian Durbin Watson	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian	82
Lampiran 2	Hasil Penelitian yang sudah diolah dengan menggunakan SPSS 10	83
Lampiran 3	Out Put Regresi persamaan 1	83
Lampiran 4	Uji Asumsi Klasik Persamaan 1	91
Lampiran 5	Output Regresi persamaan 2	92
Lampiran 6	Uji Asumsi Klasik Persamaan 2	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal sebenarnya merupakan langkah awal dari kegiatan produksi. Dengan posisi itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggalakan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri tetapi juga investor asing. Demikian pula yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Jawa tengah pada khususnya.

Selama kurun waktu 1993 sampai dengan 1996 pembangunan di Jawa Tengah menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan, hal ini dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 7 %, investasi pembangunan meningkat dan pendapatan per-kapita tahun 1996 mencapai Rp. 1.726.836,00 (Jawa Tengah Dalam Angka, 2000). Namun demikian dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis politik hingga muncul reformasi maka indikator indikator keberhasilan tersebut menurun tajam.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dalam Statistik Indonesia, 2000, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1997 hanya mencapai 3,03 % bahkan laju pertumbuhan pada tahun 1998 minus hingga 12 %.

PAD tahun 1998/1999 menurun Rp. 110 milyar dari Rp. 398,6 milyar menjadi Rp. 287,7 milyar tahun 1997 hal ini sebagai akibat dari berbagai krisis serta transisi berlakunya No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi Daerah. Walaupun demikian, agenda pembangunan tidak boleh berhenti, perencanaan program aksi hendaknya dilaksanakan sesuai dengan permasalahan aktual yang mendesak, kemampuan masyarakat dan pemerintah.

Kebijaksanaan perencanaan pembangunan yang dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat bersama pemerintah, dituangkan ke dalam rencana investasi. Sebagaimana diketahui bahwa investasi berperan amat penting dalam pembangunan. Investasi akan mendorong berkembangnya dinamika ekonomi, peningkatan produktivitas, pendapatan dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan. Namun demikian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tercatat dalam pengantar nota keuangan APBN sebesar Rp. 1,721 trilyun pada tahun 2001 dan Rp. 4,2 trilyun pada tahun 2002 . Oleh karena itu pemerintah pusat dituntut untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru. Salah satu

kunci adalah melalui penarikan investasi baik PMA maupun PMDN (BKPM Jawa Tengah, 2002).

Perkembangan PMA maupun PMDN di Indonesia berdasarkan tabel 1.1 tentang Perkembangan Persetujuan Modal di Indonesia yaitu sebagai berikut: Total Nilai PMDN dari tahun 1967 sampai dengan 2002 sebesar Rp. 840,96 trilyun dengan jumlah proyek sebanyak 12.571 proyek. Pada tahun yang sama untuk PMA sebesar US\$ 204,8 trilyun dengan jumlah proyek sebanyak 12.336 proyek. Sedangkan nilai rata-rata PMDN tahun 1967 sampai dengan 2002 sebesar Rp. 23,35 trilyun untuk PMA sebesar US\$ 5,688 milyar.

Persetujuan PMA Kumulatif dan Peringkat Nilai Investasi menurut Lokasi di Indonesia tahun 2001 (tabel 1.2) yaitu sebagai berikut: jumlah proyek pada 28 Propinsi di Indonesia tercatat jumlah proyek sebanyak 3.317 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 106,94 milyar. Sedangkan peringkat tertinggi yaitu Propinsi Jawa Barat dengan nilai US\$ 28,292 milyar atau 26,46 % dari total PMA seluruh Indonesia.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN PERSETUJUAN PMA/PMDN DI INDONESIA
TAHUN 1967 - 2002

TAHUN	PMDN		%	PMA		%
	PROYEK	NILAI Milyar Rp		PROYEK	NILAI US\$ Juta	
1	2	3	4	5	6	7
1967	0	30,0	0,004	12	207,1	0,025
1968	26	35,5	0,004	35	264,4	0,031
1969	73	112,6	0,013	37	127,5	0,015
1970	176	185,9	0,022	83	166,8	0,020
1971	214	469,3	0,056	62	287,2	0,034
1972	268	170,2	0,020	47	163,0	0,019
1973	299	158,5	0,019	69	323,8	0,039
1974	134	22,4	0,003	53	542,4	0,064
1975	78	483,6	0,058	24	1.145,0	0,136
1976	75	678,8	0,081	22	221,0	0,026
1977	155	654,8	0,078	20	167,0	0,020
1978	188	2.817,3	0,335	24	207,1	0,025
1979	166	2.291,8	0,273	22	248,6	0,030
1980	159	3.616,0	0,430	20	1.074,4	0,128
1981	164	6.476,0	0,770	24	706,5	0,084
1982	205	2.109,0	0,251	31	2.416,9	0,287
1983	333	3.736,2	0,444	46	2.470,8	0,294
1984	145	4.411,5	0,525	23	1.096,9	0,130
1985	245	10.449,6	1,243	45	853,2	0,101
1986	315	14.201,8	1,689	93	847,6	0,101
1987	570	19.593,8	2,330	130	1.520,3	0,181
1988	843	19.593,8	2,330	145	1.410,7	0,168
1989	863	56.510,5	6,720	294	4.713,5	0,560
1990	1324	41.077,9	4,885	432	8.751,1	1,041
1991	804	29.341,7	3,489	376	8.778,0	1,044
1992	436	29.341,7	3,489	305	10.323,2	1,228
1993	548	39.450,7	4,691	329	8.144,2	0,968
1994	823	53.289,1	6,337	449	23.724,3	2,821
1995	199	11.842,6	1,408	104	10.389,7	1,235
1996	810	100.715,2	11,976	959	29.931,4	3,559
1997	718	119.972,9	14,266	790	33.832,5	4,023
1998	342	60.749,3	7,224	1.035	13.563,1	1,613
1999	237	53.550,0	6,368	1.164	10.890,6	1,295
2000	354	92.327,7	10,979	1.508	15.413,1	1,833
2001	249	58.672,9	6,977	3.317	9.027,5	1,073
2002	33	1.824,2	0,217	207	830,7	0,099
TOTAL	12.571	840.965	100	12.336	204.781	

Sumber: BPM; BPS Jateng, 2002

* 1 Januari s/d 31 Maret 2002

Tabel 1.2

Persetujuan PMA Kumulatif dan Peringkat Nilai Investasi
menurut Lokasi di Indonesia tahun 2001

No	PROPINSI	PROYEK	NILAI (US\$ Juta)	Prosentase Proyek (%)	Prosentase Nilai (%)
1	Jawa Barat	1.222	28.292,7	36.84	26.46
2	Jawa Timur	285	16.866,9	8.59	15.77
3	DKI Jakarta	940	16.436,0	28.34	15.37
4	Riau	217	9.418,7	6.54	8.81
5	Sumatra Utara	75	4.754,1	2.26	4.45
6	Aceh	18	4.754,1	0.54	4.45
7	Jawa Tengah	90	4.290,4	2.71	4.01
8	Irian Jaya	30	3.955,7	0.90	3.70
9	Kalsel	29	2.800,5	0.87	2.62
10	Sulsel	23	2.758,3	0.69	2.58
11	Kaltim	44	2.514,5	1.33	2.35
12	Bali	98	2.477,0	2.95	2.32
13	Sumsel	29	1.449,7	0.87	1.36
14	Sulteng	11	840,4	0.33	0.79
15	Lampung	20	766,1	0.60	0.72
16	Sulawesi Utara	27	432,6	0.81	0.40
17	Sumatra Barat	18	309,1	0.54	0.29
18	Kalteng	31	267,8	0.93	0.25
19	Kalbar	26	122,2	0.78	0.11
20	Maluku	11	116,5	0.33	0.11
21	DIY	8	115,2	0.24	0.11
22	Bengkulu	9	93,3	0.27	0.09
23	NTB	12	81,9	0.36	0.08
24	Sulteng	9	75,3	0.27	0.07
25	Jambi	4	39,6	0.12	0.04
26	NTT	12	19,4	0.36	0.02
27	Banten	18	1.828,1	0.54	1.71
28	Gorontalo	1	1.067,7	0.03	1.00
Jumlah		3317	106943.8		

Sumber : BKPM Jateng, 2002

Dari data pada tabel 1.2 dapat dilihat perbedaan angka investasi menurut lokasi di Indonesia serta masih rendahnya investasi yang masuk ke Jawa Tengah, sehingga perlu diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai sebab-sebab rendahnya investasi maupun perbedaan investasi. Propinsi Jawa Tengah pada dasarnya merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap PMA dan PMDN di Jateng tak lepas dari variabel-variabel yang mempengaruhi secara nasional. Dimana variabel-variabel tersebut meliputi: PDRB per kapita Jawa Tengah, Infrastruktur atau panjang jalan yang telah dibangun, APBD Propinsi, Upah/gaji tenaga kerja dan inflasi di Jateng. *Pertama* PDRB yang merupakan fungsi pendapatan terdapat kaitan yang erat dengan investasi. Investasi yang merupakan fungsi pendapatan regional, semakin besar tingkat pendapatan regional yang dikeluarkan maka semakin besar pula investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat. *Kedua* pada kenyataannya terdapat kaitan yang erat antara investasi dengan panjang jalan yang telah dibangun. dengan investasi. Semakin banyak jalan yang telah dibangun, maka semakin lancar investor melaksanakan proyeknya. *Ketiga* terdapat kaitan erat antara upah/tenaga kerja dengan investasi. Jika upah terlalu tinggi maka investor akan mempertimbangkan keinginan untuk berinvestasi. *Keempat* APBD Jawa Tengah merupakan pengeluaran pembangunan. Pada kenyataannya terdapat kaitan yang erat antara investasi dengan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan mencerminkan pemerintah aktif didalam menyediakan sarana infrastruktur, hal ini mengakibatkan besar kecilnya investasi yang masuk ke

Jawa Tengah. *Kelima* terdapat kaitan erat antara investasi dengan inflasi. Apabila angka perubahan inflasi yang tidak diikuti kenaikan upah pekerja akan mendatangkan keuntungan. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi, sehingga akan mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya.

1.2 Perumusan Masalah

Investasi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sampai saat ini investasi di Jawa Tengah dirasa masih kurang atau masih rendah bila dibandingkan dengan beberapa Propinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur maupun DKI Jakarta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi tersebut antara lain:

1. Pengaruh PDRB Propinsi Jawa Tengah .
2. Pengaruh panjang jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah.
3. Pengaruh Pengeluaran total pembangunan Jawa Tengah.
4. Pengaruh upah / gaji karyawan di Jawa Tengah .
5. Pengaruh inflasi .

Dalam melakukan suatu investasi para investor sudah pasti mempertimbangkan terhadap salah satu resiko yang akan dihadapi yaitu Resiko Tingkat Bunga. Tingkat bunga yang tidak pernah stabil, hari ini naik besok turun dan demikian pula sebaliknya akan berjalan secara terus menerus akan menyebabkan investor mempertimbangkan menanamkan investasinya. Sehingga bagi seorang investor diperlukan suatu pemahaman

tersendiri terhadap kondisi tingkat suku bunga. Berdasarkan kondisi Jawa Tengah saat ini tingkat suku bunga belum stabil sejak adanya krisis sehingga di asumsikan naik turun, sehingga hal ini merupakan resiko investor yang harus dihadapi. Disamping itu tingkat suku bunga memang berpengaruh terhadap investasi di Indonesia, dan sudah dilakukan oleh peneliti lain namun demikian variabel dalam penelitian dibatasi hanya variabel yang dianggap spesifik Jawa Tengah seperti: PDRB/Kapita, Panjang jalan, APBD Propinsi, Upah/gaji karyawan dan Inflasi. Sehingga tingkat suku bunga dianggap merupakan variabel di luar Jawa Tengah dan tidak termasuk didalam penelitian ini.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh PDRB Propinsi Jawa Tengah terhadap tingkat investasi.
2. Menganalisis pengaruh panjang jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah terhadap tingkat investasi.
3. Menganalisis pengaruh APBD Propinsi Jawa Tengah terhadap tingkat investasi.
4. Menganalisis pengaruh rata-rata upah / gaji karyawan di Jawa Tengah berpengaruh terhadap tingkat investasi di Jawa Tengah.
5. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat investasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Untuk pemerintah dan masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap strategi menarik investasi di Jawa Tengah, terutama investasi asing. Juga sebagai pembelajaran pada masyarakat tentang pentingnya investasi bagi pembangunan daerah dan nasional.

b. Untuk ilmu pengetahuan

Memberi tambahan ilmu dan masukan mengenai implementasi teori-teori yang telah ada, dalam prakteknya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

DAN PENGEMBANGAN KERANGKA PIKIR TEORITIS

2.1 Telaah Pustaka

Kemampuan mengembangkan ekonomi regional untuk bertahan di abad 21 sangat tergantung pada kemampuan suatu wilayah dalam memelihara pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu diakses secara serius berbagai kepentingan global yang akan berdampak pada masa depan negara. Salah satu cara untuk merespon adalah dengan melakukan aliansi dan *partnership* diantara pemerintah, swasta dan sektor non profit. Sedangkan Soemitro (1994) menyebutkan bahwa kata kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal, sehingga strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun regional yang merangsang pembentukan modal serta pelaksanaan industri.

Sejalan dengan proses menuju desentralisasi, masing-masing daerah diharuskan mencari alternatif pembiayaan pembangunan dalam rangka meningkatkan masyarakat di daerah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu diperhatikan faktor karakteristik daerah (baik spesialisasi, keragaman dan persaingan) dan adanya investasi. Melalui kegiatan investasi diharapkan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Perbedaan kondisi daerah memberikan implikasi terhadap pembangunan yang diterapkan pada wilayah tersebut. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama pada daerah lain. Jika akan mengembangkan suatu wilayah maka perlu disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) dari wilayah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam mengenai kondisi dari masing-masing wilayah yang berguna sebagai bahan acuan dalam perencanaan pembangunan pada wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1993).

Menurut Sastrowardoyo (1994), variabel-variabel yang mempengaruhi investasi PMA dan PMDN secara umum adalah sbb:

- Kebijakan yang membentuk kondisi dalam negeri yang meliputi: stabilitas politik sosial dan ekonomi; pertumbuhan ekonomi; tingkat inflasi; tingkat suku bunga; peraturan devisa/mata uang; kualitas tenaga kerja; tingkat upah/gaji karyawan dan sistem hubungan kerja; tersedia SDA dan biaya perolehan; kecukupan pembangunan prasarana fisik (pelabuhan laut, jalan, sistem telekomunikasi dan tenaga listrik); kualitas hidup masyarakat; tingkat penguasaan IPTEK.
- Variabel-variabel makro yang meliputi : produk Domestik Bruto (PDB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tingkat resiko politik, dan nilai tukar uang (kurs dollar terhadap Rupiah)
- Sistem insentif penanaman modal yang mencakup faktor promosi yang meliputi: fasilitas perpajakan (*tax holiday*); metode depresiasi

barang modal; fasilitas dan prosedur import barang-barang modal dan bahan baku/bahan penunjang produksi; proteksi perdagangan; kemudahan penggunaan tenaga kerja; program pelatihan tenaga kerja; peraturan penanaman modal yang meliputi batas maksimum kepemilikan saham perusahaan asing; bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing; ketentuan lokasi pabrik; ketentuan barang produksi yang harus di ekspor; ketentuan proses produksi/ kandungan lokal; kebijaksanaan tentang alih teknologi dan kebijaksanaan tentang ketenagakerjaan.

Bila diperhatikan pola pembangunan wilayah-wilayah pada negara maju lebih berorientasi pada pembangunan di sektor industri, karena sektor industri dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk pembangunan wilayah. Hal ini bertolak belakang dengan pola pembangunan wilayah di negara sedang berkembang, karena pada negara sedang berkembang lebih mengarahkan pembangunan di sektor pertanian.

2.1.1 Investasi

Investasi merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal tersebut terdiri barang modal (capital stok) dapat berupa pabrik, mesin, kantor dan produk tahan lama yang digunakan untuk proses produksi (menurut R. Dornsbush & Stainley Fischer Macroeconomic Alih Bahasa oleh Julius A Mulyadi, Ekonomi Makro, Jakarta, 1989 hal 268).

Arti lain dari investasi yaitu sebagai pengeluaran (dihitung dalam jutaan rupiah) oleh sektor produsen (swasta) untuk membeli barang-barang/jasa-jasa untuk penambahan stok barang dan perluasan perusahaan (Budiono, Ekonomi Makro, seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2, BPFE, Yogyakarta, 1986 hal 40).

Investasi perusahaan atau apabila digunakan istilah dalam perhitungan pendapatan nasional dinamakan penanaman modal swasta dalam negeri bruto merupakan komponen kedua dari pembelanjaan agregat. Investasi adalah pengeluaran oleh produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk tujuan investasi, yaitu untuk penambahan stok di gudang atau perluasan pabrik-pabrik (Boediono, 1992). Bila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi oleh perusahaan lebih tidak stabil sifatnya dan menjadi salah satu sumber penting dari konjungtur perekonomian.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno, 1997).

Namun Lipsey (1995) menyebutkan bahwa Investasi adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang. Jadi seseorang melakukan investasi untuk memperoleh penghasilan selama suatu jangka waktu tertentu, menambah nilai modal yang ditempatkan dan menjaga terhadap inflasi. Namun itu semua dilakukan dengan tingkat resiko yang dapat ditolerir.

Bentuk-bentuk investasi mengarah pada penggunaan modal. Penggunaan modal yang dimaksud dapat berupa tambahan sumber daya baru atau peningkatan sumber daya yang ada. Namun sifat terpenting dari semuanya adalah bahwa hal tersebut melibatkan suatu *trade-off* antara konsumsi sekarang dan konsumsi dimasa yang akan datang, antara sedikit berkorban pada saat ini untuk memperoleh yang lebih banyak dimasa yang akan datang (Todaro, 1984).

Adapun definisi secara agregat investasi meliputi antara lain (Sadono Sukirno, 1985) :

- a. seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri.
- b. Pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal.
- c. Pertambahan nilai dalam stok-stok barang perusahaan berupa barang mentah, barang yang belum selesai di proses dan barang jadi.

Dari ketiga jenis investasi tersebut diatas yang paling penting adalah point pertama.

Dalam melakukan suatu investasi para investor sudah pasti mempertimbangkan terhadap resiko yang akan dihadapi. Ada beberapa resiko yang dihadapi oleh para investor antara lain (Boediono, 1992) :

- a. Resiko Inflasi

Merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh manusia yang hidup dalam ekonomi uang dimana daya beli yang ada dalam uang dengan berjalannya waktu mengalami erosi.

b. Resiko Tingkat Bunga

Tingkat bunga yang tidak pernah stabil, hari ini naik besok turun dan demikian pula sebaliknya akan berjalan secara terus menerus.

c. Resiko Pasar

Resiko ini timbul karena harga pasar yang tidak menentu. Macam-macam hal yang mempengaruhinya antara lain :

- Pasarnya tipis, yaitu penjual dan pembeli sedikit, hanya ada pada waktu-waktu tertentu.
- Ulah para investor yang bisa beralih-alih preferensinya terhadap suatu instrumen investasi.
- Tidak ada dana untuk melakukan investasi.

Dari beberapa resiko investasi yang harus dihadapi oleh para pemilik modal maka dapat dikatakan bahwa bagi seorang investor diperlukan suatu pemahaman tersendiri terhadap kondisi inflasi, tingkat suku bunga serta kondisi pasar karena dengan memahami kondisi inflasi, tingkat suku bunga serta kondisi pasar maka investor dapat mengoptimalkan investasinya.

Sedangkan investasi yang masuk ke Jawa Tengah dapat berasal dari PMA maupun PMDN. Berdasarkan undang-Undang UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN yang dimaksud dengan modal dalam negeri adalah Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan modal dalam negeri di atas bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman tersebut dapat dilakukan secara langsung, yaitu oleh pemiliknya sendiri atau

tidak langsung, melalui pembelian obligasi-obligasi, saham-saham dan surat berharga lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, serta deposito dan tabungan yang bejangka sekurang-kurangnya satu tahun. Sedangkan yang disebut modal asing adalah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang di atas diperkenankan ditransfer, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia.

Pengertian Penanaman Modal Asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Konsep Marginal Efficiency of Capital (MEC)

Dalam teori makro Keynes keputusan apakah suatu investasi akan dilaksanakan atau tidak, tergantung kepada perbandingan besarnya keuntungan yang diharapkan (yang dinyatakan dalam persentase per satuan waktu). Dalam teori Keynes, tingkat keuntungan yang diharapkan ini disebut dengan istilah Marginal Efficiency of Capital (MEC), jadi

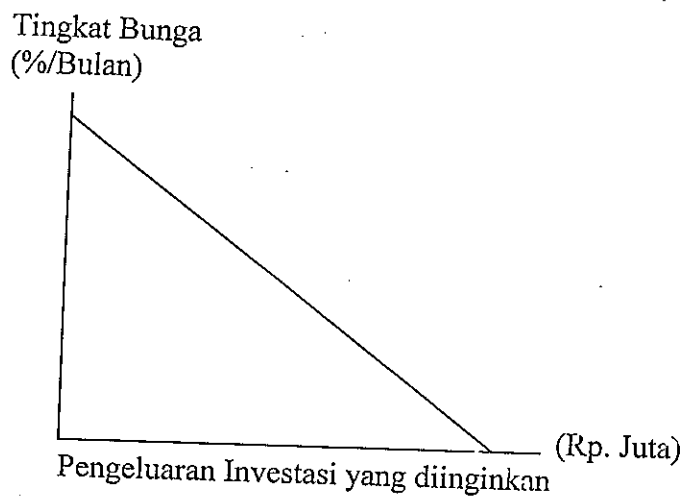
secara singkat: Bila keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar dari tingkat bunga maka investasi akan dilaksanakan. Bila MEC lebih kecil dari tingkat bunga maka investasi tidak dilaksanakan dan bila MEC sama dengan 0 maka investasi bias dilaksanakan atau tidak oleh pemilik modal.

Dari uraian diatas mengenai MEC maka diketahui bahwa berapa tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor ditentukan oleh dua hal, yaitu tingkat bunga yang berlaku dan Marginal Efficiency of Capital atau fungsi investasi. Fungsi MEC dan fungsi investasi ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan oleh para investor ditentukan oleh dua hal yaitu tingkat bunga yang berlaku dan Marginal Efficiency of Capital atau fungsi investasi. Fungsi MEC atau fungsi investasi ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat bunga investasi yang diinginkan oleh para investor.

Tiga hal yang perlu digaris bawahi mengenai fungsi investasi *pertama*, fungsi tersebut mempunyai slope yang negatif, artinya semakin rendah tingkat bunga semakin besar tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan (atau yang direncanakan). *Kedua*, dalam kenyataannya fungsi semacam itu sulit untuk diperoleh sebab posisinya sangat labil (mudah berubah dalam waktu yang singkat). Kelebihan fungsi investasi ini akan segera bias dipahami bila kita ingat bahwa posisinya sangat tergantung pada nilai-nilai MEC nya yang merupakan suatu tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Dan oleh karena didasarkan atas harapan masa depan atau expectation (jadi atau dasar perhitungan yang subyektif),

maka MEC suatu proyek bias saja berubah dari hari ke hari dan peka terhadap kondisi social ekonomi – politik suatu negara. Misalnya adanya gejolak politik, desas desus adanya tindakan devaluasi, pembatasan import, akan langsung merubah penilaian subyektif investor terhadap suatu proyek. Karena banyaknya factor-faktor yang bias mempengaruhi MEC, maka posisi investasi akan sangat mudah berubah. Kelebihan fungsi investasi ini merupakan penjelasan teoritis dari Keynes mengenai fakta yang disebutkan terdahulu yaitu bahwa dalam kenyataan pengeluaran investasi (I) menunjukkan gejolak naik turun yang sulit diduga dari waktu ke waktu. Kelebihan ini adalah suatu ciri yang membedakan I dengan unsure-unsur agregat yang lain (C, G). Hal ketiga yang perlu ditekankan adalah hubungan antara investasi Keynes tersebut dengan kenyataan, khususnya mengenai masalah tersedianya dana investasi. Teori Keynes didasarkan atas anggapan bahwa pada tingkat bunga yang berlaku setiap investor bias memperoleh dana berapapun untuk membiayai proyek-proyek yang ia anggap menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang membatasi jumlah yang ingin ia investasikan hanyalah penilaian mengenai MEC mengenai proyek-proyek yang terbuka baginya, dalam kenyataannya sering dijumpai keadaan yang sebaliknya, yaitu begitu banyaknya proyek yang menguntungkan (MEC tinggi) tetapi sulit untuk memperoleh dana untuk membiayai semuanya. Kesulitan untuk memperoleh kredit dari Bank misalnya, mengakibatkan tingkat investasi yang direalisasikan lebih kecil daripada tingkat investasi yang diinginkan.

Gambar 2.3
Kurva Fungsi Investasi (MEC)



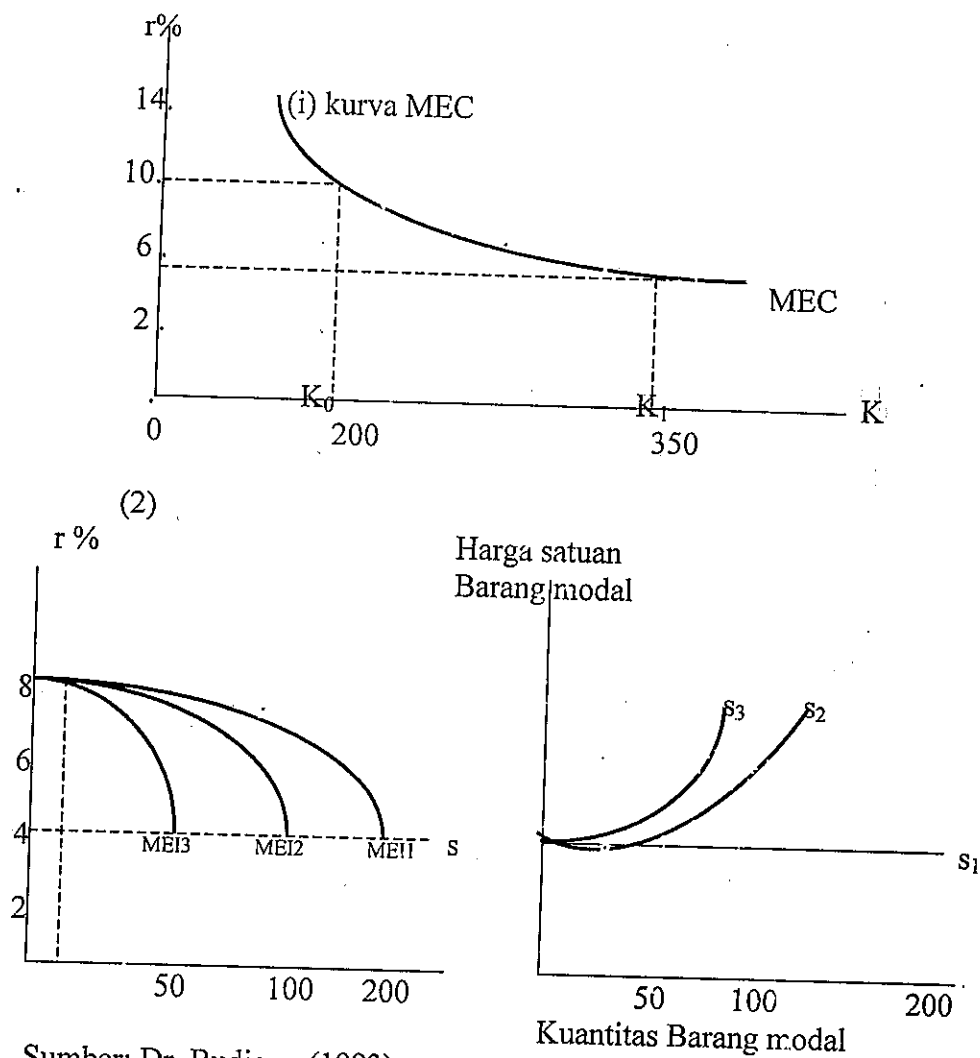
Sumber: Dr. Budiono (1993)

Dari Kurva MEC ke Kurva MEI

Kurva Marginal Efficiency of Investment (MEI) mempunyai bentuk mirip dengan bentuk kurva Marginal Efficiency of Capital (MEC), yaitu keduanya kekanan menurun, akan tetapi kedua kurva tersebut merupakan kurva yang berbeda. Kalau investasi (investment) merupakan pengertian flow atau aliran, sedangkan modal (Capital) merupakan pengertian stok, namun antara kurva MEC maupun MEI ada hubungan.

Investasi dalam ekonomi makro bias diartikan sebagai pengeluaran masyarakat untuk memperoleh alat-alat modal baru. Oleh karena itu investasi total yang terjadi dalam suatu perekonomian sebagian berupa pembelian alat-alat modal baru untuk menggantikan alat-alat modal yang sudah tidak ekonomis untuk dipakai lagi, dan sebagian lain berupa pembelian alat-alat modal baru untuk memperbesar stok modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4 halaman berikutnya

Gambar 2.4
Hubungan antara MEC dan MEI serta Penawaran Modal



Sumber: Dr. Budiono (1993)

Investasi jenis pertama, yaitu yang maksudnya untuk menggantikan alat-alat modal yang tidak dapat lagi dipakai, yang biasa disebut sebagai replacement, besar kecilnya terutama tergantung terutama kepada besarnya stok nasional yang ada. Kalau misalnya mula-mula perekonomian berada dalam keseimbangan dengan tingkat bunga tertinggi 10% dan stok modal equilibrium berada jumlah Rp. 200 milyar, seperti yang ditunjukkan oleh titik A pada kurva MEC 2.3 (i), maka apabila tingginya penyusutan $D = 10\%$, berarti bahwa besarnya investasi untuk replacement adalah Rp. 20 milyar, atau ditunjukkan pada titik a pada kurva MEI pada gambar 2.4 (2).

Mengenai bentuk kurva MEI dari titik a kebawah, factor utama yang turut menentukan adalah bentuk fungsi penawaran akan barang-barang kapital, yang beberapa kemungkinan bentuknya (lihat gambar 2.4 (3))

Apabila kurva penawaran tersebut bentuknya garis lurus sejajar dengan sumbu kuantitas, maka kurva MEI akan bergerak dari titik a ke bawah dengan bentuk dan lereng persisi seperti yang digambarkan oleh kurva MEC (a ke MEI2). Jika diasumsikan kurva penawaran alat kapital berbentuk ke kanan naik, dengan menggunakan asumsi *ceteris paribus*, maka banyak proyek investasi yang nilai MEC nya menurun. Ini berarti bahwa banyak proyek investasi yang menurut perhitungan semula menguntungkan sebagai akibat kenaikan harga alat-alat kapital berubah menjadi tidak lagi menguntungkan (kurva MEI dari titik a ke MEI2)

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan daerah merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi ekonomi internasional dan kapasitas pemerintah daerah. Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi digunakan untuk menghubungkan perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan

pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berkaitan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, lokasi dan tingkat pemberian subsidi dan insentif.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau propinsi dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengertian PDRB dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda namun mempunyai pengertian yang sama, yaitu (Arsyad, 1999):

- a. Menurut cara produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam pengajian ini dikelompokkan menjadi sembilan kelompok lapangan usaha, yaitu : (i) pertanian; (ii) pertambangan dan penggalian; (iii) industri pengolahan; (iv) listrik, gas dan air bersih; (v) bangunan; (vi) perdagangan, hotel, dan restoran; (vii) pengangkutan dan komunikasi; (viii) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (ix) jasa-jasa.
- b. Menurut cara pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi diatas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto.

Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut *Nilai Tambah Bruto*.

- c. Menurut cara pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari utang; (2) konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal tetap domestik bruto; (4) perubahan stock; (5) ekspor netto.

Dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor. Dari ketiga pendekatan tersebut diatas, secara konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah komponen nilai tambah bruto termasuk didalamnya balas jasa faktor produksi. Selanjutnya PDRB seperti telah diuraikan diatas sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya mencakup komponen tidak langsung netto. Selanjutnya PDRB dapat dikaji menjadi dua, yaitu (Arsyad, 1999):

1. PDRB atas dasar harga berlaku

Jumlah nilai produk atau pengeluaran atau pendapatan yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

2. PDRB atas dasar harga konstan

Jumlah nilai produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu, (misalnya tahun dasar 1983 dan 1993).

Adapun manfaat perhitungan nilai PDRB, diantaranya (Arsyad, 1999):

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian.

Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah itu daerah industri, pertanian atau jasa dan dan berapakah besar masing-masing sektornya. Dengan bekal perhitungan ini maka dapat diketahui kemana arah perekonomian suatu daerah bergerak berapa laju kecepatan gerakannya berapa besar dibutuhkan waktu untuk mencapai sasaran.

2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu

Oleh karena nilai PDRB dicatat setiap tahun, maka akan dipunyai catatan angka dari tahun ke tahun sehingga dapat diperbandingkan nilainya dari tahun ke tahun. dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan, apakah ada perubahan struktur atau tidak dan juga apakah ada penambahan atau pengurangan kemakmuran materiil atau tidak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naik turunnya PDRB menggambarkan secara jelas mengenai kondisi dari daerah atau regional yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan PDRB dijadikan salah satu acuan bagi para investor untuk memahami kondisi dari daerah yang diinginkan.

Pada kenyataannya terdapat kaitan yang erat antara investasi dengan pendapatan nasional. Investasi yang merupakan fungsi pendapatan nasional Semakin besar tingkat pendapatan nasional semakin besar pula pengeluaran investasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, seperti tercermin dalam PDB (untuk tingkat nasional) dan PDRB (tingkat regional) maka terdapat kecenderungan peningkatan pula dalam pembentukan modal domestik bruto. Secara prinsip hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran investasi dapat diuraikan sebagai berikut. Produsen (investor) akan menanamkan modalnya jika

proyek yang dilaksanakan menguntungkan. Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah investasi/proyek dapat diperkirakan mendatangkan keuntungan ialah adanya permintaan akan barang dan jasa dari masyarakat yang meningkat. Adapun peningkatan permintaan akan barang dan jasa merupakan salah satu dampak dari adanya peningkatan pendapatan. Dengan demikian adanya peningkatan pendapatan akan menimbulkan dampak terhadap meningkatnya permintaan barang dan jasa yang diminta. Hal ini sekaligus juga akan mengakibatkan meningkatnya jumlah proyek-proyek yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan regional mencerminkan kemampuan masyarakat di dalam wilayah tersebut untuk menyerap hasil produksi (*Ability to purchase*), sehingga akan merangsang para investor untuk meningkatnya investasinya. Disamping itu tingginya pendapatan masyarakat juga mencerminkan kemampuan didalam mengembalikan modal (*Ability to Pay*). Hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut akan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya dengan pertimbangan modal yang ditanamkan, di masa yang akan datang bisa kembali (menguntungkan). Sehingga nampak jelas bahwa pendapatan berpengaruh terhadap investasi baik PMA maupun PMDN.

2.1.3 Pengeluaran Pembangunan (APBD Propinsi)

Pengeluaran Pemerintah dapat dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang akan menambah modal sosial masyarakat seperti jalan, pelabuhan dan lain - lain. Sedang pengeluaran rutin adalah pengeluaran

pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah, pemeliharaan gedung pemerintah, membiayai fasilitas sosial untuk keperluan penduduk (Sadono Sukirno, 1981).

Pengeluaran pembangunan lebih berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari pada pengeluaran rutin. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pembangunan akan menghasilkan penyediaan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah, dimana kenyataannya bahwa kegagalan suatu daerah untuk menarik modal di daerahnya sering disebabkan karena kurangnya prasarana yang tersedia.

Berkenaan dengan masalah tersebut distribusi dari pengeluaran pemerintah ke berbagai daerah dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : pengeluaran yang tersebar merata keseluruh daerah, pemusatan pengeluaran di daerah maju, dan pemusatan pengeluaran di daerah yang terbelakang (Sadono Sukirno, 1981). Dikaitkan dengan tujuan pemerataan maka alokasi pengeluaran pembangunan diprioritaskan pada daerah terbelakang sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan daerahnya.

Pengeluaran pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pos pengeluaran di dalam APBN (bagi suatu negara) atau APBD bagi suatu daerah. Semakin besar pos yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk pengeluaran pembangunan, maka semakin besar pula peran pemerintah didalam membangun penyediaan sarana infrastruktur dimana kelengkapan sarana infrastruktur juga mendukung masuknya investasi. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah didalam penyediaan sarana infrastruktur dapat dilihat dari pengeluaran pembangunan didalam pengeluaran total.

Hal ini menunjukkan pengeluaran pembangunan mempengaruhi peran investor untuk menanamkan modalnya. Dengan asumsi bahwa besarnya peranan tersebut mencerminkan pemerintah aktif didalam menyediakan sarana infrastruktur, maka akan berpengaruh secara positif terhadap besar kecilnya investasi di Jawa Tengah. Dari uraian di atas jelas bahwa peranan pengeluaran total, yang mencerminkan peran pemerintah didalam menyediakan sarana infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap masuknya investasi di Jawa Tengah.

2.1.4 Inflasi

Menurut pernyataan Sadono Sukirno (1997) definisi dari inflasi adalah sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi dapat diartikan sebagai persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu. Tingkat inflasi berbeda dari suatu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya. Tingkat inflasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Tingkat inflasi ringan

Yaitu tingkat inflasi yang mencapai dibawah 10 persen dalam setahun.

2. Tingkat inflasi sedang

Yaitu tingkat inflasi yang mencapai antara 10 - 30 persen dalam setahun.

3. Tingkat inflasi berat

Yaitu tingkat inflasi yang mencapai 30 – 100 persen dalam setahun.

4. Hiperinflasi

Yaitu tingkat inflasi yang mencapai diatas 100 persen dalam setahun.

Berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dibedakan kepada hal-hal berikut ini :

1. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang terwujud dalam pasar. Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan pesat.

2. Inflasi desakan biaya

Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksikannya. Kerap kali inflasi desakan biaya berlaku pada ketika perekonomian hampir atau telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh yaitu pada ketika perekonomian menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja.

Inflasi membawa dampak yang buruk kepada perekonomian, dimana inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai *stimulator* bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi dimasa

datang dan ini akan mewujudkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi apabila inflasi menjadi lebih serius keadaannya, perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah pernah mengalami inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

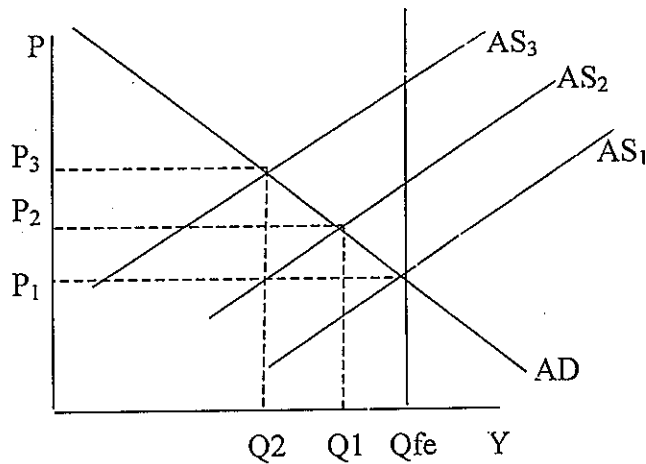
Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk sekiranya inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah besar apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil terlebih dahulu ekonomi harus distabilkan dan ini termasuk usaha menstabilkan harga-harga.

Menurut Soemitro Djojohadikusumo (1994), dalam dua dasawarsa terakhir bila diamati maka dorongan terhadap kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian Indonesia secara spesifik disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kenaikan harga barang dan jasa meliputi:

- a. Devaluasi
- b. Kenaikan gaji pegawai negeri
- c. Kenaikan harga BBM
- d. Kenaikan tarif listrik

Gambar 2.1

Grafik Teori Inflasi



Sumber : Todaro (1984)

Bermula pada harga P_1 dan Q_{fe} , kenaikan biaya produksi (disebabkan karena tuntutan kenaikan upah buruh), maka akan menggeser kurva penawaran agregat dari AS_1 ke AS_2 . Konsekwensinya harga naik menjadi P_2 dan produksi turun menjadi Q_1 , kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS_3 , harga naik dan produksi turun menjadi Q_2 . Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser katas. Proses semacam ini sering dibarengi dengan turunnya produksi. Sehingga inflasi dengan asumsi terjadinya dari sisi penawaran akan menurunkan produksi. Turunnya produksi akan diikuti dengan turunnya investasi. Dalam penelitian ini inflasi yang digunakan adalah inflasi yang dirasionalkan dengan inflasi nasional. Cara ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah inflasi di Jawa Tengah lebih besar ataukah lebih kecil bila dibandingkan dengan inflasi nasional, semakin besar rasio menunjukkan kenaikan inflasi Jawa Tengah lebih cepat dari pada inflasi nasional.

2.1.5 Penyediaan Infrastruktur

Salah satu faktor investor dalam menanamkan modalnya adalah penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan proyek/investasi yang akan dilaksanakan. Ini penting mengingat akan berhasil tidaknya suatu proyek yang akan dilaksanakan.

Sebagai contoh perusahaan/investor mengadakan suatu proyek investasi di daerah yang sarananya belum memadai, maka semua biaya yang semestinya tidak dikeluarkan oleh investor, ditanggung oleh investor, seperti pembuatan jalan, listrik dan lain sebagainya, yang itu semua berdampak pada biaya produksi, yang pada gilirannya akan menaikkan harga barang yang dihasilkan. Disamping itu sarana infrastruktur yang kurang memadai akan mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Begitu juga sebaliknya sarana infrastruktur yang memadai akan memperlancar proses kegiatan ekonomi. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sarana infrastruktur cukup berpengaruh terhadap investasi. Investasi disini termasuk investasi asing didalamnya.

Dalam penelitian ini mengingat keterbatasan data dan mengingat banyaknya sarana infrastruktur yang mendukung, maka yang memudahkan didalam penelitian, digunakan sarana infrastruktur jalan yang dinyatakan dalam Km. Sesuai konteksnya, sarana infrastruktur jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah. Semakin banyak jalan yang ada/ tersedia maka akan semakin memperlancar investor untuk melaksanakan proyeknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur berpengaruh terhadap besar kecilnya investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah.

2.1.6 Upah Gaji Karyawan

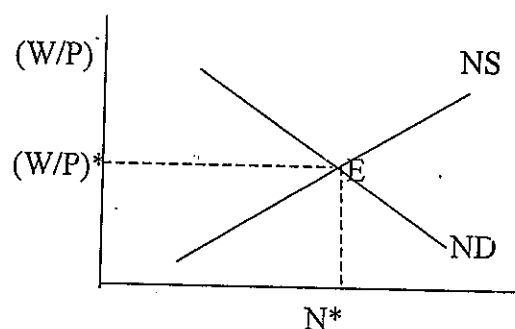
Pembangunan investasi diharapkan mampu menciptakan peluang tenaga kerja, selain itu diharapkan mampu memasukkan teknologi baru dibidang industri dan membuka pasar internasional!.

Perubahan pendidikan tenaga kerja akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga dengan sendirinya dibutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan (Dumairi, 1996). Mengingat tingkat keterampilan berpengaruh terhadap produktivitas, ketersediaan tenaga kerja terampil, yang ditunjukan dengan tingkat pendidikan formal, menjadi salah satu pertimbangan dalam tenaga kerja terampil membawa dampak positif terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya.

Namun ketersediaan tenaga kerja yang tinggi tidak akan banyak berdampak pada investasi, jika tarif upah yang menjadi standar pada daerah tersebut tinggi. Keterkaitan antara ketersediaan tenaga kerja dan tarif upah terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Grafik Equilibrium Pasar Tenaga Kerja



Sumber: Sadono Sukirno (1994); Dr. Budiono (1987)

Kurva permintaan tenaga kerja (ND) memiliki kemiringan menurun. Artinya, makin rendah tarif upah, makin besar jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan kurva penawaran tenaga kerja dengan kemiringan menaik (NS) berarti bahwa semakin besar upah tenaga kerja, maka makin mau mereka menambah jam kerja.

Dengan demikian terlihat bahwa untuk menanamkan investasinya seorang investor akan memerlukan banyak tenaga kerja. Untuk dapat menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan investor juga akan mempertimbangkan faktor upah yang harus dikeluarkan. Jika upah terlalu tinggi maka investor akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upah karyawan juga berpengaruh terhadap investasi yang akan dilakukan oleh investor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aryanti (1991) di Daerah istimewa Yogyakarta yang menggunakan model analisa regresi dan korelasi diketahui bahwa ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah angkatan kerja, tingkat bunga tertimbang deposito berjangka dan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 terhadap investasi baik PMA maupun PMDN. Kesimpulan pula bahwa, keempat faktor tersebut secara serempak mempengaruhi investasi swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adhita Prawatyo (1994) meneliti pengaruh PMA, tingkat bunga, tingkat inflasi dan penyediaan sarana PMA terhadap PMA dengan menggunakan model Ln, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bunga, tingkat inflasi dan penyediaan sarana PMA terhadap PMA.

Peneliti lain, Riya Suharnata (1989), menganalisis pengaruh PMA, upah dan deregulasi PMA terhadap PMA di Indonesia menyimpulkan, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara upah, PMDN dan deregulasi PMA terhadap PMA di Indonesia.

Elia Radianto (1997) yang melakukan penelitian di daerah Maluku dengan menggunakan Model Linier Dinamis (MLD). Hasilnya menunjukkan bahwa nilai investasi swasta di daerah Maluku belum sepenuhnya baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai investasi yang belum mencerminkan semua informasi yang ada. Untuk PDRB dan tingkat suku bunga misalnya tidak signifikan atau tidak dapat menjelaskan variasi investasi swasta adalah angkatan kerja.

Secara ringkas hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai PMA dan PMDN, disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Matriks Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
Aryanti (1991)	Regresi dan korelasi Dengan model $I = f(\text{PDRB}, \text{angkatan kerja}, \text{bunga deposito}, \text{deregulasi perbankan})$	Terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah angkatan kerja, tingkat bunga tertimbang deposito berjangka dan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 terhadap investasi baik PMA maupun PMDN
Elia Radianto (1997)	Model Linier Dinamis (MLD) Dengan model $I = f(\text{PDRB}, \text{angkatan kerja}, \text{tingkat suku bunga}, \text{PDRBt-1})$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ investasi swasta di daerah Maluku belum sepenuhnya baik ➤ PDRB dan tingkat suku bunga misalnya tidak signifikan atau tidak dapat menjelaskan variasi investasi swasta adalah angkatan kerja
Adhita Prawatyo (1994)	Regresi Dengan model $I = f(\text{tingkat bunga}, \text{inflasi dan penyediaan prasarana PMA})$	Terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat bunga, inflasi dan penyediaan prasarana PMA terhadap PMA.
Riya Suharnata (1989)	Regresi Dengan model $I = f(\text{upah}, \text{deregulasi PMA}, \text{deregulasi PMDN})$	Terhadap pengaruh yang signifikan dari upah dan deregulasi PMA dan PMDN terhadap PMA.

Sumber : Dari berbagai sumber.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Perangsangan terhadap investor dalam menanamkan investasinya pada suatu wilayah mempunyai banyak pertimbangan, apalagi bila investasi yang dimaksud mengarah pada investasi di bidang Industri. Suatu wilayah dapat akan menarik investor untuk menanamkan investasinya apabila kondisi wilayah tersebut mendukung ke arah terlaksananya industrialisasi dengan diikuti oleh tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri tersebut.

Dengan mempelajari suatu wilayah serta mengadakan pengkajian yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di wilayah yang diprediksikan akan memberikan hasil yang menggiurkan, maka seorang investor tidak akan segan-segan untuk menanamkan investasinya pada wilayah tersebut.

Dengan melihat perumusan masalah yang ada maka akan dilakukan penelitian untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan suatu metode penelitian. Kerangka pemikiran diawali dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya PMA dan PMDN di Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut meliputi : rasio PDRB per kapita Jawa Tengah, panjang jalan dalam suatu wilayah, proporsi pengeluaran total APBD Jateng, rata-rata upah/gaji karyawan di Jawa Tengah terhadap tingkat upah karyawan nasional dan inflasi di Jawa Tengah. Penggunaan variabel-variabel di atas karena variabel-variabel tersebut merupakan variabel pokok dalam penanaman modal baik PMA maupun PMDN.

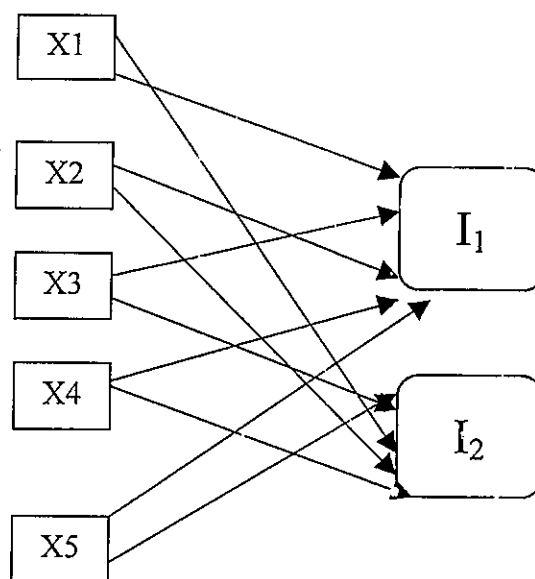
Dengan model sebagai berikut :

- a. $PMA = f(\text{PDRB, panjang jalan, pengeluaran pembangunan, rata-rata upah, inflasi})$
- b. $PMDN = f(\text{PDRB, panjang jalan, pengeluaran pembangunan, rata-rata upah, inflasi})$

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran teoritis tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : dikembangkan untuk penelitian ini

Keterangan :

- I_1 = Investasi PMA di Jawa Tengah (dalam juta Dolar AS)
- I_2 = Investasi PMDN di Jawa Tengah (dalam juta Rupiah)
- X_1 = PDRB per kapita Jawa Tengah (dalam juta Rupiah)
- X_2 = Panjang jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah yang dinyatakan dalam Km.
- X_3 = Pengeluaran total APBD Jateng (dalam juta Rupiah)
- X_4 = rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan Jateng
- X_5 = Inflasi Propinsi Jateng

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PDRB/Kapita Jateng, panjang jalan yang telah dibangun di Jateng, proporsi pengeluaran total dalam APBD Jawa Tengah, upah gaji pekerja karyawan Jawa tengah, inflasi Jawa Tengah, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah.
2. PDRB per kapita Jawa Tengah berpengaruh secara nyata dan positif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah.
3. Panjang jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah.
4. Pengeluaran total dalam APBD Propinsi Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jateng.
5. Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah.
6. Inflasi di Jawa Tengah berpengaruh secara negatif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data-data tersebut bersumber dari BKPM, BPM, BPS, Bappeda, JDA, Nota Keuangan Republik Indonesia selama periode penelitian yaitu dari tahun 1967 sampai dengan 2002 dengan asumsi pada rentang waktu tersebut sudah cukup mencerminkan kondisi investasi di Jawa Tengah sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai investasi pada tahun 1967. Sedangkan data secara rentan waktu tahun 1967 sampai dengan tahun 2002 dalam bentuk time series.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan adalah PMA dan PMDN sebagai variabel dependen, sedangkan PDRB/Kapita, panjang jalan yang telah dibangun, pengeluaran total dalam APBD, rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan Jawa Tengah, inflasi Jawa Tengah sebagai variabel independen.

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah :

1. PMA adalah penanaman modal yang dilakukan oleh orang asing atau usaha patungan antara investor asing dan dalam negeri, maupun bukan usaha patungan, dalam bentuk investasi langsung. Dalam penelitian ini sumber data realisasi PMA di Propinsi Jawa Tengah. Penanaman modal asing diukur dengan total nilai investasi asing di Jawa Tengah dengan satuan mata uang US\$ juta.

2. PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri di atas bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder persetujuan penanaman modal yang sudah direalisasi. Nilai investasi PMDN di Jawa Tengah dengan satuan mata uang Rupiah.
3. PDRB Jawa Tengah adalah nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh Jateng dalam satu tahun tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan PDRE menurut harga yang tidak berubah dari satu tahun ke tahun lainnya atau dikenal dengan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 1993 dan dinyatakan dalam jutaan Rupiah.
4. Panjang jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah adalah total panjang jalan kelas I dan kelas II di Propinsi Jawa Tengah. Semakin banyak jalan yang tersedia di Jawa Tengah maka akan semakin lancar investor untuk melaksanakan proyeknya. Dalam penelitian ini mengingat banyaknya infrastruktur seperti listrik, telpon dll, sehingga untuk memudahkan dalam penelitian maka mengambil variabel jalan yang dinyatakan dalam satuan kilometer.
5. Pengeluaran total dalam APBD Propinsi Jateng, adalah total belanja daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Sedangkan yang berkaitan dengan APBD II tidak termasuk didalam penelitian, disebabkan APBD II di dalam struktur APBD propinsi hanya sebagai pendamping APBD Propinsi.

6. Upah/gaji pekerja/karyawan Jawa Tengah adalah rata-rata upah/gaji yang diterima masyarakat di Jawa Tengah dan mencerminkan pendapatan yang diterima masyarakat. Dalam penelitian ini upah dinyatakan dalam rupiah.
7. Inflasi Jawa Tengah adalah proses kenaikan harga-harga dalam suatu tahun. Dalam penelitian ini inflasi dinyatakan dalam persen.

3.3 Teknik Analisis

Dalam menaksir dan menganalisis variabel-variabel yang digunakan penelitian, disamping teori ekonomi, digunakan juga pendekatan ekonometrika yang berupa analisis regresi dan korelasi.

Analisis regresi digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel dependen dengan salah satu atau lebih variabel independen. Disamping itu analisis regresi dapat dipakai untuk menaksir koefisien persamaan regresi dari data pengamatan.

Dalam penelitian itu alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi, yang dirumuskan sbb:

$$I = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, E_i)$$

Persamaan yang digunakan dalam analisis data adalah persamaan dengan menggunakan pola estimasi logaritmis. Pola ini terbentuk jika persamaan yang digunakan memakai variabel dengan nilai logaritma. Dua bentuk pola estimasi logaritmis, yaitu pola estimasi semi logaritmis dan pola estimasi logaritmis ganda. Perbedaan ke dua pola secara rumusan

hanyalah pada nilai variabel independennya. Pada pola semi logaritmis nilai variabel independennya menggunakan variabel absolut, sementara nilai variabel dependen memakai nilai logaritme. Sedangkan pola atau persamaan dimaksud dalam penelitian ini memakai pola logaritmis ganda karena menggunakan nilai logaritma pada variabel dependent maupun independent.

$$I = e^{\alpha} X_1^{\beta_1} \dots X_5^{\beta_5}$$

Persamaan diatas apabila di Ln kan menjadi

$$\ln I = \ln \alpha_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + \beta_5 \ln X_5 + e$$

Untuk memperoleh taksiran parameter tersebut dicari dengan menggunakan metode OLS untuk memperoleh nilai regresi sedemikian sehingga kesalahan e nya minimum.

Dimana :

- I = PMA dan PMDN di Jawa Tengah
- X1 = PDRB per kapita Jawa Tengah
- X2 = Panjang jalan kelas I dan II yang telah dibangun di Jawa Tengah yang dinyatakan dalam Km.
- X3 = Pengeluaran total APBD Jateng
- X4 = Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan Jateng
- X5 = Tingkat inflasi di Propinsi Jateng
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ = Koefisien regresi
- β_4, β_5 = Koefisien regresi
- α_0 = konstanta

E_i = Gangguan stokhatis adalah pengganti dari semua variabel yang dihilangkan dari model tetapi yang secara bersama-sama mempengaruhi Y .

\ln = Logaritma natural

3.4 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan Program SPSS 10 yang meliputi :

a. Uji multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melakukan regresi tambahan (*auxiliary regression*), yaitu dengan melakukan regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Dari hasil regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lain kemudian dibandingkan nilai R^2 -nya dengan nilai R^2 dari regresi utama. Apabila nilai R^2 dari regresi tambahan lebih besar dari nilai regresi utama maka dapat dipastikan bahwa terdapat gejala multikolinearitas (Gujarati, 1995).

b. Uji heteroskedastisitas

Pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas memakai uji park (Gujarati, 1995), dengan langkah sebagai berikut :

1. Melakukan regresi terhadap model persamaan yang diajukan sehingga diperoleh nilai residual sebagai variabel baru.
2. Hasil residual yang didapatkan kemudian dikuadratkan dan diubah menjadi bentuk log linier. Setelah itu semua variabel bebas yang

diajukan diubah menjadi bentuk log natural. Melakukan regresi dari semua variabel hasil transformasi dari variabel asli.

3. Melakukan identifikasi terhadap nilai t dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika t hitung $<$ t tabel maka asumsi homokedastisitas diterima
- Jika t hitung $>$ t tabel maka asumsi homokedastisitas ditolak

c. Uji autokorelasi

Untuk melakukan uji autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan besaran Durbin Watson, dimana ketentuannya adalah (Gujarati, 1995):

Tabel 5.1.
Persyaratan Uji Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$dU < d < 4 - dU$

Sumber : Gujarati, 1995.

3.5 Pengujian Parameter Simultan dengan F-test

Pengujian F-test dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara variabel-variabel bebas yang ada pada model dengan variabel tergantung secara simultan atau bersama-sama. Pengujian setiap koefisien regresi secara individu dikatakan signifikan terhadap variabel tergantung jika F hitung lebih besar daripada F kritis atau F tabel, sebaliknya tidak signifikan apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel.

3.6 Parameter Individu dengan t-test

Pengujian t-test dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara variabel-variabel bebas yang ada pada model dengan variabel tergantung secara individu. Pengujian setiap koefisien regresi secara individu dikatakan signifikan terhadap variabel tergantung jika t hitung lebih besar daripada t kritis atau t tabel, sebaliknya tidak signifikan apabila t hitung lebih kecil daripada t tabel.

GAMBARAN UMUM

4.1 Keadaan Wilayah Jawa Tengah

Propinsi Jawa Tengah adalah satu dari 32 propinsi di Indonesia yang terletak di antara $108^{\circ} 30'$ sampai $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 30'$ sampai $8^{\circ} 30'$ garis Lintang Selatan. Batas propinsi wilayah Jawa Tengah adalah :

- Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Utara Samudera Indonesia

Luas wilayah propinsi Jawa Tengah adalah 3.254.000 Ha yang terdiri dari 35 Dati II, yaitu 29 Kabupaten (dengan kota administratif), 6 Kotamadya dan 5.477 desa atau Kelurahan.

Secara topografis Jawa Tengah dapat digolongkan wilayah dengan ketinggian 0-100 m di atas permukaan, meliputi 53,3% antara 100-500m meliputi 27,4%; 500-1000 m meliputi 14,7% ketinggian lebih dari 1000 m di atas permukaan laut sebesar 4,60%.

4.1.1 Investasi PMA di Jawa Tengah

Perkembangan penanaman modal asing di Jawa Tengah selama periode 1967 sampai dengan 2002 selalu mengalami fluktuasi. Secara umum sebelum datangnya krisis ekonomi yaitu pada pertengahan tahun 1997, gairah investasi swasta sangat baik dan menunjukkan peningkatan. Nilai PMA terbesar pada tahun 1996 sebesar US\$ 24,587 milyar dan pada tahun 1997 sebesar US\$ 24,834 milyar (table 4.1). Akan tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi terutama mulai tahun 1998 kegiatan penanaman modal asing mengalami penurunan sebesar 23,66% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian pada tahun 1999 sampai dengan tahun berikutnya menunjukkan perbaikan yang berjalan lambat. Pertumbuhan rata-rata tahun 1967 s/d 2002 menunjukkan angka sebesar 11,6 % yang diperoleh dari metode end to end (rumus pertumbuhan) yaitu :

$$I_{(t-t-1)} = \left[\frac{PMA_t}{PMA_{t-1}} \right]^{1/n} - 1 \times 100\%$$

Tabel 4.1

**Investasi PMA di Jawa Tengah
yang telah direalisasi
Periode 1967 - 2002**

TAHUN	Nilai PMA (US\$ juta)	PERTUMBUHAN PER TAHUN (%)
1	2	3
1967	206,44	-
1968	265,07	28.40
1969	127,74	-51.81
1970	3.294,47	2.479.03
1971	287,15	-91.28
1972	578,25	101.38
1973	727,78	25.86
1974	845,56	16.18
1975	934,49	10.52
1976	561,16	-39.95
1977	1.012,32	80.40
1978	1.187,97	17.35
1979	880,07	-25.92
1980	1.619,71	84.04
1981	4.317,45	197.43
1982	992,27	-79.40
1983	1.224,15	23.37
1984	2.951,30	141.09
1985	5.115,34	73.33
1986	1.286,91	-74.84
1987	1.380,22	7.25
1988	5.014,05	263.28
1989	7.42,63	58.41
1990	3.394,80	-57.26
1991	4.628,55	36.34
1992	17.676,65	231.90
1993	10.404,57	-41.14
1994	15.214,44	46.23
1995	18.958,35	24.61
1996	24.587,66	29.69
1997	24.834,77	1.01
1998	18.958,35	-23.66
1999	17.854,31	-5.82
2000	15.677,78	-12.19
2001	5.767,53	-63.21
2002	9.604,62	66.53
Rata-rata		11,6

Sumber: BPS Jateng, 2002

4.1.2 Investasi PMDN di Jawa Tengah

Penanaman modal dalam negeri semakin marak pada tahun-tahun sampai akhir tahun 1997, karena adanya kebijakan tentang penanaman modal. Diantaranya instruksi presiden No. 5 tahun 1984, Surat Keputusan Ketua BKPM No. 10 tahun 1985, serta instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 dan No. 21 tahun 1986. Dokumen tersebut pada intinya berisikan kebijaksanaan penyederhanaan prosedur perijinan penanaman modal. Realisasi terbesar yaitu pada tahun 1996 dengan nilai sebesar Rp. 119,965 milyar (table 4.2). Setelah tahun 1997, karena krisis ekonomi yang berkepanjangan menimbulkan menurunnya minat berinvestasi di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Tengah pada khususnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PMDN dalam kurun waktu 1967 s/d 2002 berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode end to end rumus pertumbuhan (sama dengan model PMA) yaitu sebesar 14,4 %.

Tabel 4.2
Investasi PMDN di Jawa Tengah
yang telah direalisasi
Periode 1967 – 2002

TAHUN	Nilai PMDN (juta Rp)	PERTUMBUHAN PER TAHUN
1	2	3
1967	713.37	-
1968	837.15	17.35
1969	862.64	3.05
1970	1,450.99	68.20
1971	1,141.39	-21.34
1972	1,450.99	27.12
1973	1,619.71	11.63
1974	1,826.21	12.75
1975	1,958.63	7.25
1976	1,808.04	-7.69
1977	2,724.39	50.68
1978	2,980.96	9.42
1979	2,565.73	-13.93
1980	4,402.82	71.60
1981	9,045.29	105.44
1982	3,866.09	-57.26
1983	5,486.25	41.91
1984	11,158.98	103.40
1985	14,764.78	32.31
1986	8,103.08	-45.12
1987	10,198.54	25.86
1988	21,162.80	107.51
1989	29,143.87	37.71
1990	21,375.49	-26.66
1991	28,853.89	34.99
1992	61,697.58	113.83
1993	44,355.86	-28.11
1994	70,262.96	58.41
1995	84,965.45	20.92
1996	119,372.01	40.49
1997	109,097.80	-8.61
1998	80,017.45	-26.66
1999	67,507.91	-15.63
2000	67,507.91	0.00
2001	51,021.38	-24.42
2002	80,017.45	56.83
Rata-rata		14,4

Sumber: BPS Jateng, 2002

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah

PDRB sebagai bahan pertimbangan oleh para investor untuk mengetahui kondisi ekonomi dari suatu wilayah. Perkembangan PDRB di Jawa Tengah dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2002 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 1979 sebesar Rp. 2,835 milyar ke tahun 1980 sebesar Rp. 3,751 milyar atau meningkat sebesar 32,31 %. Peningkatan berikutnya yaitu pada peningkatan tahun 2001 ke tahun 2002 atau meningkat sebesar 32,31 %.

Berkaitan dengan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, diketahui bahwa pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1997 hanya mencapai 3,03 % bahkan laju pertumbuhan pada tahun 1998 minus hingga 12 %, namun justru PDRB tumbuh positif dari tahun ke tahun, sehingga dengan adanya krisis tersebut tidak berpengaruh terhadap perkembangan PDRB Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB di Jawa Tengah dapat terlihat dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993
Jawa Tengah
Periode 1967 – 2002 (Jutaan Rupiah)

TAHUN	PDRB	PERTUM- BUHAN
1967	1,339.43	-
1968	1,450.99	8.33
1969	1,510.20	4.08
1970	1,603.59	6.18
1971	1,652.43	3.05
1972	1,754.61	6.18
1973	1,844.57	5.13
1974	1,958.63	6.18
1975	2,018.28	3.05
1976	2,143.08	6.18
1977	2,465.13	15.03
1978	2,565.73	4.08
1979	2,835.57	10.52
1980	3,751.83	32.31
1981	5,014.05	33.64
1982	5,710.15	13.88
1983	7,331.97	28.40
1984	8,866.19	20.92
1985	10,097.06	13.88
1986	11,498.82	13.88
1987	13,629.61	18.53
1988	16,481.60	20.92
1989	18,769.72	13.88
1990	21,590.31	15.03
1991	26,108.08	20.92
1992	30,333.26	16.18
1993	33,860.35	11.63
1994	39,340.11	16.18
1995	46,630.03	18.53
1996	52,575.21	12.75
1997	60,475.89	15.03
1998	62,943.95	4.08
1999	63,576.55	1.01
2000	65,512.75	3.05
2001	72,402.78	10.52
2002	95,798.28	32.31

Sumber: BPS Jateng; Bappeda Jateng.

4.1.4 Panjang Jalan di Jawa Tengah

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi PMA maupun PMDN adalah tersedianya sarana dan prasarana yang ada di suatu daerah. Semakin lengkap sarana yang tersedia, maka akan semakin menarik bagi investor. Salah satu sarana yang mutlak harus ada dan menjadi pertimbangan bagi investor adalah tersedianya jalan yang memadai di suatu daerah, sehingga memudahkan untuk melakukan akses ke daerah tersebut. Pembangunan jalan dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini dibuktikan dengan jalan yang telah dibangun maupun yang diperbaiki. Dalam penelitian ini panjang jalan merupakan total dari jalan yang dibangun atau diperbaiki dari kelas kelas I, II, III, IIIa, IIIb, IIIc. Panjang jalan yang dibangun di propinsi Jawa Tengah yang paling banyak terjadi pada tahun 1988 dengan panjang jalan 18.033,74 Km 1989 dengan panjang jalan 20.743,74 Km atau mengalami kenaikan sebesar 13,88 %. Sedangkan pada tahun 1998 sampai dengan 1999 pembangunan jalan di Jawa Tengah justru turun 13,06 %, hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda pertengahan 1997 yang mengakibatkan penurunan pembiayaan pemerintah baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun dana-dana lain. Secara rinci dapat disajikan pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Peningkatan Jalan kelas III di Jawa Tengah
pada tahun 1967 – 2002 (Km)

TAHUN	PJALAN	PERTUMBUHAN
1967	6,310.69	-
1968	7,707.89	22.14
1969	7,480.09	-2.96
1970	8,184.52	9.42
1971	8,518.54	4.08
1972	9,996.60	17.35
1973	10,829.16	8.33
1974	11,158.98	3.05
1975	11,271.13	1.01
1976	11,614.39	3.05
1977	11,731.12	1.01
1978	11,731.12	0.00
1979	12,088.38	3.05
1980	12,209.87	1.01
1981	13,766.59	12.75
1982	14,185.85	3.05
1983	14,764.78	4.08
1984	15,063.05	2.02
1985	15,677.78	4.08
1986	15,994.50	2.02
1987	17,154.23	7.25
1988	18,033.74	5.13
1989	20,537.34	13.88
1990	20,743.74	1.01
1991	21,590.31	4.08
1992	22,247.34	3.05
1993	23,388.51	5.13
1994	23,623.56	1.01
1995	25,591.10	8.33
1996	27,722.51	8.33
1997	29,143.87	5.13
1998	31,888.48	9.42
1999	27,722.51	-13.06
2000	29,143.87	5.13
2001	30,031.44	3.05
2002	35,954.16	19.72

Sumber: Buku Jawa Tengah Dalam Angka

4.1.5 Pengeluaran total Propinsi Jateng di Jawa Tengah (APBD I)

Pengeluaran pemerintah provinsi Jawa Tengah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan prioritas yang diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengeluaran pembangunan tidak terlepas dari konseptualisasi dari kebijakan perencanaan pembangunan, pemrograman kegiatan-kegiatan pembangunan dan akhirnya diimplementasikan melalui alokasi anggaran belanja pembangunan. Sementara itu, sumber penerimaan terbesar pemerintah daerah adalah dari penerimaan rutin seperti pajak, retribusi daerah. Di sisi lain, Pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah juga memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan pemerintah, yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya pengeluaran pembangunan paling banyak yaitu tahun 1993 ke tahun 1994, hal ini tercatat sebesar 52,20 % (table 4.5) artinya peran pemerintah didalam pembangunan seperti infrastruktur sangat besar. Sehingga apabila peran pemerintah daerah didalam penyediaan infrastruktur cukup besar, maka akan lebih memperlancar proses kegiatan perekonomian. Pengeluaran pemerintah dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2002 disajikan pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Pengeluaran Pembangunan di Jawa Tengah
Periode 1967 – 2002 (Jutaan Rupiah)

TAHUN	TOTPENGG	PERTUMBUHAN
1967	62.18	-
1968	65.37	5.13
1969	70.81	8.33
1970	71.52	1.01
1971	74.44	4.08
1972	75.94	2.02
1973	79.04	4.08
1974	83.10	5.13
1975	85.63	3.05
1976	91.84	7.25
1977	95.58	4.08
1978	98.49	3.05
1979	121.51	23.37
1980	183.09	50.68
1981	242.26	32.31
1982	270.43	11.63
1983	295.89	9.42
1984	336.97	13.88
1985	376.15	11.63
1986	395.44	5.13
1987	298.87	-24.42
1988	454.86	52.20
1989	518.01	13.88
1990	578.25	11.63
1991	678.58	17.35
1992	812.41	19.72
1993	1,096.63	34.99
1994	1,669.03	52.20
1995	1,958.63	17.35
1996	2,440.60	24.61
1997	2,751.77	12.75
1998	3,261.69	18.53
1999	3,394.80	4.08
2000	3,983.83	17.35
2001	4,722.06	18.53
2002	5,486.25	16.18

Sumber : BPS Jawa Tengah

4.1.6 Gaji Karyawan di Jawa Tengah

Gaji karyawan merupakan faktor lain yang juga berpengaruh terhadap investasi. Dari tahun ke tahun gaji karyawan di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Sedangkan peningkatan terbesar yaitu pada tahun 1981 sebesar Rp. 15.677,78 ke tahun 1982 sebesar Rp. 28.853,89 atau mengalami peningkatan sebesar 84,04 %. Peningkatan gaji di satu sisi berdampak pada perbaikan ekonomi karyawan, tetapi disisi lain berdampak pada makin tingginya biaya produksi. Dari segi investasi, baik PMA maupun PMDN, gaji karyawan berpengaruh negatif terhadap investasi. Semakin tinggi gaji karyawan, maka akan semakin menurun investasi. Tetapi hal ini tidak terjadi serta merta atau dengan kata lain gaji karyawan bersama faktor-faktor yang lain akan mempengaruhi investasi di Jawa Tengah. Peningkatan gaji karyawan dari tahun ketahun disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Gaji Karyawan di Jawa Tengah
Periode 1967 – 2002

TAHUN	GAJI	PERTUMBUHAN
1967	7,186.79	-
1968	7,331.97	2.02
1969	7,631.20	4.08
1970	7,863.60	3.05
1971	7,942.63	1.01
1972	8,103.08	2.02
1973	8,349.86	3.05
1974	8,518.54	2.02
1975	8,777.97	3.05
1976	9,045.29	3.05
1977	9,136.20	1.01
1978	9,228.02	1.01
1979	11,849.01	28.40
1980	12,964.89	9.42
1981	15,677.78	20.92
1982	28,853.89	84.04
1983	30,946.03	7.25
1984	33,523.43	8.33
1985	35,596.41	6.18
1986	47,098.67	32.31
1987	50,513.71	7.25
1988	54,720.85	8.33
1989	58,104.59	6.18
1990	69,563.83	19.72
1991	73,130.44	5.13
1992	76,114.95	4.08
1993	85,819.37	12.75
1994	93,901.35	9.42
1995	96,761.07	3.05
1996	100,709.96	4.08
1997	113,550.16	12.75
1998	130,613.78	15.03
1999	153,276.69	17.35
2000	185,349.78	20.92
2001	265,667.29	43.33
2002	344,551.90	29.69

Sumber: BPS Jateng, 2002

4.1.7 Inflasi di Jawa Tengah¹

Inflasi sebagai salah satu penyakit makro ekonomi yang relatif sulit diatasi. Hal itu terjadi karena inflasi merupakan *resultante* atau dampak dari berbagai kekuatan supply-demand di pasar barang maupun di pasar uang. Inflasi yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1967 sampai dengan tahun 2002 masih termasuk skala ringan dan sedang, apabila dilihat pada table 4.7. Inflasi tertinggi yaitu pada tahun 1998 sebesar 17,64 %. Kenaikkan ini semula disebabkan oleh menurunnya nilai uang rupiah terhadap US dollar. Bahkan pada tahun tersebut kurs dollar sampai mencapai Rp. 15.000,-. Dari penurunan mata uang rupiah tersebut akhirnya terjadi krisis ekonomi yang berubah menjadi krisis total yaitu pada 1998 tersebut.

Salah satu cara untuk mengukur inflasi yaitu melalui perubahan Indeks Harga Konsumen atau Indeks Biaya Hidup. Perhitungan tingkat inflasi menurut IHK dapat dilakukan dengan perhitungan :

$$\text{Inflasi}_t = (\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}) / \text{IHK}_{t-1}$$

Dimana:

Inflasi_t = Inflasi tahun t

IHK_t = IHK pada tahun t

IHK_{t-1} = IHK pada tahun t-1

Secara umum upaya penekanan inflasi akan memberikan dampak positif bagi kegiatan investasi di wilayah tersebut. Perkembangan Inflasi Jawa Tengah dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2002 disajikan pada Tabel 4.7 berikut :

¹) Hera Susanti, Moh Ihsan dan Widayanti. Dalam buku indikator-indikator Makroekonomi Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995

Tabel 4.7
Inflasi di Jawa Tengah Periode 1967 – 2002

TAHUN	INFLASI	PERTUMBUHAN
1967	9.21	-
1968	9.49	3.05
1969	9.87	4.08
1970	4.90	-50.34
1971	9.68	97.39
1972	9.21	-4.88
1973	8.94	-2.96
1974	8.76	-1.98
1975	8.25	-5.82
1976	9.68	17.35
1977	9.30	-3.92
1978	9.12	-1.98
1979	9.58	5.13
1980	9.30	-2.96
1981	5.42	-41.73
1982	8.25	52.20
1983	9.49	15.03
1984	5.81	-38.74
1985	4.48	-22.89
1986	9.78	118.15
1987	9.58	-1.98
1988	5.31	-44.57
1989	4.81	-9.52
1990	9.03	87.76
1991	9.58	6.18
1992	4.35	-54.62
1993	9.39	115.98
1994	6.49	-30.93
1995	8.67	33.64
1996	6.49	-25.17
1997	11.02	69.89
1998	17.64	60.00
1999	13.87	-21.34
2000	10.49	-24.42
2001	9.97	-4.88
2002	8.17	-18.13

Sumber: BPS Jateng

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Uji Penyimpangan Klasik

Adapun pengujian terhadap asumsi klasik dengan program SPSS 10.0 yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :

a. Uji Multikolinieritas

Setelah dilakukan uji multikolinieritas pada variabel-variabel bebas dengan menggunakan *auxiliary regression*, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas pada model yang diajukan bebas dari multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan dengan indikator nilai R^2 pada *auxiliary regression* lebih kecil dari pada nilai R^2 pada model persamaan yang diajukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 4.5.

Tabel 5.1
Perbandingan Nilai R^2

	R^2	
	Model PMA	Model PMDN
Regresi Model	0,999	0,933
Auxiliary Regression I	0,992	0,915
Auxiliary Regression II	0,960	0,905
Auxiliary Regression III	0,975	0,920
Auxiliary Regression IV	0,981	0,924
Auxiliary Regression V	0,142	0,142

b. Uji Heteroskedastisitas

Setelah dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park, maka hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang signifikan. Dengan demikian data yang digunakan pada model persamaan tidak terkena heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 5.2. dan Tabel 5.3.

Tabel 5.2
Uji Heteroskedastisitas Model PMA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	52.923	31.268		1.693	.101
	ln PDRB	-.316	2.913	-.193	-.108	.914
	ln PJALAN	-6.328	4.172	-.1254	-1.517	.140
	ln TOTPENG	1.848	1.685	1.148	1.097	.281
	ln UPAH	.246	2.337	.126	.105	.917
	ln INFLASI	-2.120	1.366	-.275	-1.552	.131

a. Dependent Variable: LN_RES2

Tabel 5.3
Uji Heteroskedastisitas Model PMDN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-20.865	23.964		-.871	.391
	ln PDRB	-3.293	2.232	-2.793	-1.475	.151
	ln PJALAN	2.356	3.197	.647	.737	.467
	ln TOTPENG	.692	1.291	.596	.536	.596
	ln UPAH	2.109	1.791	1.502	1.178	.248
	ln INFLASI	.355	1.047	.064	.339	.737

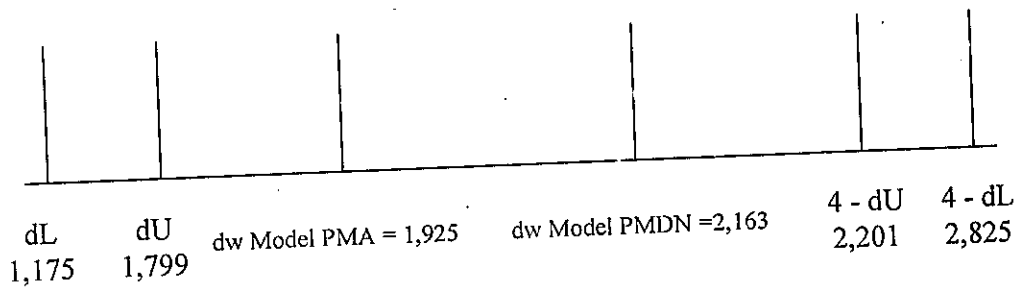
a. Dependent Variable: LNRES2

Dari tabel 4.6 dan Tabel 4.7 pada bagian signifikansi menunjukkan tidak ada variabel yang signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan demikian pada kedua persamaan tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji mapping Durbin Watson (DW). Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,925 untuk model PMA dan sebesar 2,163 untuk model PMDN (lihat lampiran SPSS). Dengan jumlah data (n) sama dengan 36 dan jumlah variabel (k) sama dengan 5 diperoleh angka $d_L = 1,175$ dan $d_U = 1,799$.

Gambar 5.1
Hasil Pengujian Durbin Watson



Karena nilai Durbin Watson dari model PMA dan model PMDN terletak antara $4 - d_U$ dan d_U maka tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

5.2 Model Persamaan PMA

Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS 10, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 5.4
Hasil Estimasi PMA
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.454	.599		-.758	.454
	ln PDRB	2.063	.056	1.781	36.944	.000
	ln PJALAN	.701	.080	.196	8.764	.000
	ln TOTPENG	6.935E-02	.032	.061	2.147	.040
	ln UPAH	-1.456	.045	-1.055	-32.490	.000
	ln INFLASI	-.611	.026	-.112	-23.319	.000

a. Dependent Variable: ln PMA

Hasil estimasi hasil pengolahan dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\ln I_{PMA} = -0,454 + 2,063 \ln X_1 + 0,701 \ln X_2 + 0,007 \ln X_3 - 1,456 \ln X_4 - 0,611 X_5$$

Keterangan :

- I_{PMA} = Penanaman Modal Asing (PMA)
- X_1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
- X_2 = Panjang Jalan (PJALAN)
- X_3 = Total Pengeluaran (TOTPENG)
- X_4 = Tingkat Upah/Gaji Karyawan (UPAH)
- X_5 = Tingkat Inflasi di Jawa Tengah (INFLASI)
- F_{hitung} = 10121,586
- $DW_{test} PMA$ = 1,925
- $DW_{test} PMDN$ = 2,163
- R^2 = 0,999

Besarnya koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,999 atau 99,9 persen ini dapat diartikan bahwa 99,9 persen variasi variabel tidak bebas dapat

diterangkan oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya (0,1 persen) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar model.

5.2.1 Pengujian Secara Serentak

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada persamaan estimasi PMA nilai uji F_{hitung} adalah 10121,586 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian pada persamaan estimasi PMA variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto/kapita (PDRB/kapita) Jawa Tengah, panjang jalan yang dibangun, total pengeluaran, tingkat upah dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PMA.

5.2.2 Pengujian Secara Parsial

Pengujian koefisien regresi parsial atau uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Penentuan t-tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5 persen (0,05 : 2) dengan $df = n - k$ didapatkan nilai t-tabel : 2,042 sedangkan t-hitung dari hasil output komputer melalui program *SPSS 10.0*

Melihat nilai t_{hitung} yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas memang berpengaruh nyata (*significant*) pada tingkat alfa 5 persen. Secara rinci, maka pengujian secara parsial berdasarkan perhitungan uji-t untuk persamaan diuraikan sebagai berikut :

Dengan melihat nilai t_{hitung} variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto lebih besar daripada t_{tabel} ($36,944 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PMA. Dengan koefisien sebesar 2,063 dan bertanda positif berarti memberi pengaruh positif, sehingga dalam hal ini β_1 bertanda positif. Dengan demikian variabel $\ln X_1$ berpengaruh positif terhadap $\ln I_{PMA}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Pendapatan Domestik Regional Bruto meningkat 1 persen maka PMA akan meningkat sebesar 2,063 persen.

Dengan melihat pada nilai t_{hitung} variabel Panjang Jalan lebih besar daripada t_{tabel} ($8,764 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Panjang Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PMA. Dengan koefisien sebesar 0,701 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : β_2 bertanda positif berarti, variabel $\ln PJALAN$ memberi pengaruh positif terhadap $\ln I_{PMA}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika panjang jalan meningkat 1 persen maka PMA akan naik sebesar 0,701 persen.

Nilai t_{hitung} variabel Total Pengeluaran lebih besar daripada t_{tabel} ($2,147 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Total Pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PMA. Dengan koefisien sebesar 0,007 dapat diinterpretasikan β_3 bertanda positif berarti, variabel X_3 memberi pengaruh positif terhadap $\ln I_{PMA}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Total Pengeluaran meningkat 1 persen maka PMA akan meningkat sebesar 0,007 persen.

Sedangkan pada nilai t_{hitung} variabel tingkat Upah lebih kecil daripada t_{tabel} ($-32,490 < -2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel PMA. Dengan koefisien sebesar -1,456 dapat diinterpretasikan β_4 bertanda negatif. Hal ini berarti, variabel X_4 memberi pengaruh positif terhadap $\ln I_{PMA}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat upah meningkat 1 persen (1% dari prosen atau 1/10.000) maka PMA akan menurun sebesar 1,456 persen.

Nilai t_{hitung} variabel tingkat inflasi lebih kecil daripada t_{tabel} ($-23,319 < -2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel PMA. Dengan koefisien X_5 sebesar (-0,611) dapat diinterpretasikan β_5 bertanda negatif berarti, variabel X_5 memberi pengaruh negatif terhadap $\ln I_{PMA}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat inflasi meningkat 1 persen maka PMA akan menurun sebesar 0,611 persen.

5.3 Model Persamaan PMDN

Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS 10, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 5.5
Hasil Estimasi PMDN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.560	5.652		-.276	.784
	ln PDRB	1.617	.526	1.576	3.071	.005
	ln PJALAN	1.789	.754	.565	2.373	.024
	ln TOTPENGG	.651	.305	.644	2.137	.041
	ln UPAH	-2.295	.422	-.878	-5.432	.000
	ln INFLASI	-1.256	.247	-.260	-5.086	.000

a. Dependent Variable: ln PMDN

Hasil estimasi hasil pengolahan dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\ln I_{\text{PMDN}} = -1,560 + 1,617 X_1 + 1,789 \ln X_2 + 0,651 \ln X_3 - 2,295 \ln X_4 - 1,256 X_5$$

Keterangan :

- I_{PMDN} = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- X_1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
- X_2 = Panjang Jalan (PJALAN)
- X_3 = Total Pengeluaran
- X_4 = Tingkat Upah/Gaji Karyawan
- X_5 = Tingkat Inflasi di Jawa Tengah
- F_{hitung} = 83,298
- DW_{test} = 2,163
- R^2 = 0,933

Besarnya koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,933 atau 93,3 persen ini dapat diartikan bahwa 93,3 persen variasi variabel tidak bebas dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya (6,7 persen) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar model.

5.3.1 Pengujian Secara Serentak

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada persamaan estimasi PMDN nilai uji F_{hitung} adalah 83,298 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian pada persamaan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto, panjang jalan, total pengeluaran, tingkat upah dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PMDN.

5.3.2 Pengujian Secara Parsial

Pengujian koefisien regresi parsial atau uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Melihat nilai t_{hitung} yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas memang berpengaruh nyata (*significant*) pada tingkat alfa 5 persen. Secara rinci, maka pengujian secara parsial berdasarkan perhitungan uji-t untuk persamaan diuraikan sebagai berikut :

Dengan melihat nilai t_{hitung} variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto lebih besar daripada t_{tabel} ($3,071 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan

bahwa variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PMDN. Dengan sebesar 1,617 dan bertanda positif berarti memberi pengaruh positif, sehingga dalam hal ini β_1 bertanda positif. Dengan demikian variabel PDRB berpengaruh positif terhadap $\ln I_{PMDN}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Pendapatan Domestik Regional Bruto meningkat 1 persen maka PMDN akan meningkat sebesar 1,617 persen.

Dengan melihat pada nilai t_{hitung} variabel Panjang Jalan lebih besar daripada t_{tabel} ($2,373 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Panjang Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PMDN. Dengan koefisien sebesar 1,789 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : β_2 bertanda positif berarti, variabel PJALAN memberi pengaruh positif terhadap $\ln I_{PMDN}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika panjang jalan meningkat 1 persen maka tingkat PMDN akan naik sebesar 1,789 persen.

Nilai t_{hitung} variabel Total Pengeluaran lebih besar daripada t_{tabel} ($2,137 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Total Pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PMDN. Dengan koefisien sebesar 0,651 dapat diinterpretasikan β_3 bertanda positif berarti, variabel total pengeluaran memberi pengaruh positif terhadap $\ln I_{PMDN}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Total Pengeluaran meningkat 1 persen maka PMDN akan meningkat sebesar 0,513 persen.

Sedangkan pada nilai t_{hitung} variabel tingkat Upah lebih kecil daripada t_{tabel} ($-5,432 < -2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel PMDN.

Dengan koefisien sebesar $-2,295$ dapat diinterpretasikan β_4 bertanda negatif. Hal ini berarti, variabel Upah memberi pengaruh positif terhadap PMDN. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat upah meningkat 1 persen maka PMDN akan menurun sebesar 2,295 persen.

Nilai t_{hitung} variabel tingkat inflasi lebih kecil daripada t_{tabel} ($-5,086 < -2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel PMDN. Dengan koefisien sebesar $(-1,256)$ dapat diinterpretasikan β_5 bertanda negatif berarti, variabel inflasi memberi pengaruh negatif terhadap PMDN. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat inflasi meningkat 1 persen (1% dari prosen atau $1/10.000$) maka PMDN akan menurun sebesar 1,256.

5.4. Model Persamaan PMA dan PMDN

Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS 10 Berdasarkan nilai koefisien dari variabel-variabel yang dijumlahkan antara PMA dan PMDN diperoleh koefisien regresi model persamaan PMA dan PMDN sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 5.6
Hasil Estimasi PMA dan PMDN

Coefficients		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10,702	2,203		-4,859	,000
	LNPDRB	2,258	,121	2,102	18,698	,000
	LNPJJL	9,178E-02	,361	,025	,254	,802
	LNTOTPEN	,214	,067	,207	3,198	,004
	LNGAJI	-1,693	,083	-1,348	-20,474	,000
	INFLSI	-8,070E-02	,007	-,151	-11,315	,000
	IHK	3,655E-03	,002	,032	2,300	,030

a Dependent Variable: LNINVEST

Hasil estimasi hasil pengolahan dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\ln I_{PMA+PMDN} = - 10,702 + 2,258 \ln X1 + 0,0917 \ln X2 + 0,214 \ln X3 - 1,693 \ln X4 - 0,0807 X5 + 0,0036 X6$$

Keterangan :

$I_{PMA+PMDN}$	=	Total PMA dan PMDN
X1	=	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
X2	=	Panjang Jalan (PJALAN)
X3	=	Total Pengeluaran (TOTPENG)
X4	=	Tingkat Upah/Gaji Karyawan (UPAH)
X5	=	Tingkat Inflasi di Jawa Tengah (INFLASI)
X6	=	Indeks Harga Konsumen (IHK)
F_{hitung}	=	1569,475
DW_{test}	=	1,737
R^2	=	0,997

Besarnya koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,997 atau 99,7 persen ini dapat diartikan bahwa 99,7 persen variasi variabel tidak bebas dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya (0,3 persen) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar model.

5.4.1. Pengujian Secara Serentak

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada persamaan estimasi PMA dan PMDN nilai uji F_{hitung} adalah 1569,475 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian pada persamaan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto, panjang jalan, total pengeluaran, tingkat upah, tingkat

inflasi dan IHK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap investasi di Jawa Tengah.

5.4.2. Pengujian Secara Parsial

Pengujian koefisien regresi parsial atau uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Melihat nilai t_{hitung} yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t_{tabel} , maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas memang berpengaruh nyata (*significant*) pada tingkat alfa 5 persen. Secara rinci, maka pengujian secara parsial berdasarkan perhitungan uji-t untuk persamaan diuraikan sebagai berikut :

Dengan melihat pada tabel 4.11 di atas diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto lebih besar daripada t_{tabel} ($18,698 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap total investasi di Jawa Tengah. Dengan koefisien $\ln X_1$ sebesar 2,258 dapat diartikan bahwa variabel $\ln PDRB$ berpengaruh positif terhadap \ln investasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Pendapatan Domestik Regional Bruto meningkat 1 persen maka PMDN akan meningkat sebesar 1,617 persen.

Dengan nilai t_{hitung} variabel Panjang Jalan lebih besar daripada t_{tabel} ($2,254 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Panjang Jalan berpengaruh positif terhadap total investasi di Jawa Tengah. Dengan

koefisien panjang jalan sebesar 0,0917 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : β_2 bertanda positif berarti, variabel panjang jalan memberi pengaruh positif terhadap \ln Investasi, Hal ini dapat dimaknai bahwa jika panjang jalan meningkat 1 persen maka tingkat investasi naik sebesar 0,0917 persen. Namun demikian dari hasil estimasi diketahui bahwa signifikansi P_{jalan} sebesar 0,802, berarti panjang jalan tidak berpengaruh terhadap investasi.

Nilai t_{hitung} variabel Total Pengeluaran lebih besar daripada t_{tabel} ($3,198 > 2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Total Pengeluaran berpengaruh positif terhadap total investasi di Jawa Tengah. Dengan koefisien total pengeluaran sebesar 0,214 dapat diinterpretasikan β_3 bertanda positif berarti, variabel $\ln X_3$ memberi pengaruh positif terhadap \ln Investasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika Total Pengeluaran meningkat 1 persen maka Investasi akan meningkat sebesar 0,214 persen.

Sedangkan pada nilai t_{hitung} variabel tingkat Upah/gaji lebih kecil daripada t_{tabel} ($-20,454 < -2,042$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat Upah berpengaruh negatif terhadap total investasi di Jawa Tengah. Dengan koefisien tingkat upah/gaji karyawan (X_4) sebesar $-1,693$ dapat diinterpretasikan β_4 bertanda negatif. Hal ini berarti, variabel tingkat upah gaji karyawan memberi pengaruh positif terhadap \ln Investasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat upah meningkat 1 persen maka Investasi akan menurun sebesar 1,693 persen.

Nilai t_{hitung} variabel tingkat inflasi lebih kecil daripada t_{tabel} (-11,354 < -2,042) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap total investasi, namun demikian IHK yang merupakan prosen pembentukan dari inflasi justru berpengaruh positif terhadap total investasi. Dengan koefisien $Ln X_5$ sebesar (-0,0807) dapat diinterpretasikan β_5 bertanda negatif berarti, variabel X_5 memberi pengaruh negatif terhadap $ln I_{PMA+PMDN}$. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika tingkat inflasi meningkat 1 persen maka investasi akan menurun sebesar 0,0807 persen.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil analisis data yang dilakukan dan perhitungan hasil analisis pada Bab IV sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Kemudian atas dasar kesimpulan tersebut maka pada penelitian ini juga akan memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

6.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. PDRB per kapita Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap PMA lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh PDRB terhadap PMDN
2. Panjang jalan yang telah dibangun di Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pengaruh panjang jalan yang telah dibangun terhadap PMDN lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh panjang jalan yang telah dibangun terhadap PMA.
3. Total pengeluaran berpengaruh positif terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pengaruh total pengeluaran terhadap PMDN lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh total pengeluaran terhadap PMA.

UPT-PUSTAK-UNDIP

4. Rata-rata upah / gaji karyawan di Jawa Tengah berpengaruh terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pengaruh rata-rata upah / gaji karyawan terhadap PMDN lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh rata-rata upah / gaji karyawan terhadap PMA.
5. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pengaruh tingkat inflasi terhadap PMDN lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tingkat inflasi terhadap PMA.
6. Secara keseluruhan kelima variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai PMA dan PMDN di Jawa Tengah, dimana variabel PDRB berpengaruh paling besar terhadap nilai PMA di Jawa Tengah sedangkan variabel independen yang berpengaruh paling besar terhadap PMDN di Jawa Tengah adalah Variabel panjang jalan.

6.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Usaha peningkatan PMA atau PMDN di Jawa Tengah sejauh mungkin dilakukan karena mempunyai *multiplier effect* terhadap peningkatan perekonomian Jawa Tengah yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
2. Penyediaan sarana prasarana yang memadai sangat mendukung bagi terciptanya iklim berinvestasi di Jawa Tengah. Sehingga dalam rangka peningkatan ekonomi Jawa Tengah pengalokasian APBD Propinsi Jawa

Tengah pada tahun mendatang lebih dicermati kembali berkaitan dengan sector-sektor prioritas Jawa Tengah. Dari hasil penelitian bahwa pengeluaran total yang dipergunakan untuk pembiayaan infrastruktur jalan mempunyai signifikansi positif artinya semakin banyak infrastruktur yang dibangun utamanya jalan akan berdampak pada masuknya investasi baik PMA maupun PMDN.

3. Menindaklanjuti hasil pembahasan pada waktu ujian tesis pada tanggal 26 Januari 2004 yang berkaitan dengan usulan perubahan salah satu variabel independent, untuk digantikan dengan masuknya variabel lain yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), setelah penulis pertimbangkan dan dikonsultasikan dengan rekan-rekan se alumni, BPS dihasilkan sebagai berikut: Pertama data yang sudah diperoleh ternyata IHK yang ada belum semua Kabupaten/Kota tersedia data, padahal dalam penelitian ini focus pembahasan adalah tingkat Propinsi. Kedua setelah pengujian asumsi klasik dengan memasukkan nilai IHK dari data BPS maka terjadi multikolinearitas dan terjadi Heteroskedastisitas.

Sehingga dengan berbagai pertimbangan maka variabel independent yang dipakai dalam penelitian masih mempertahankan inflasi. Namun demikian apabila ada pembaca ataupun peneliti yang ingin meneliti mengenai permasalahan dimaksud maka dengan segala keikhlasan penulis meromendasikan untuk diteliti, hal ini dimungkinkan masing-masing peneliti mempunyai teknis maupun pemikiran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhita Prawatyo, 1994, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia**, Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, 1989-1993, **Proyeksi Penanaman Modal di Jawa Tengah**, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Bank Indonesia, **Laporan Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah**, (Beberapa edisi).
- Bank Indonesia, **Laporan Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia**, Bank Indonesia, (Beberapa edisi)
- Biro Pusat Statistik, Berbagai Edisi, **Buletin Ringkas Ekonomi**, BPS, Jakarta
- Biro Pusat Statistik, Berbagai Edisi, **Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia**, BPS, Jakarta
- Boediono, 1992, **Teori Pertumbuhan Ekonomi**, Seri Synopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, no. 4, BPFE, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar, 1995, **Ekonometrika Dasar**, terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta.
- Gunawan Sumodiningrat, **Ekonometrika : Pengantar**, Cetakan kedua, BPFE UII, Yogyakarta.
- J. Supranto, 1983, **Ekonometrik**, buku satu, LPFE UII, Jakarta.
- Lipsey, Richard G., 1995, **Pengantar Makro Ekonomi**, Jilid I, Binarupa Aksara, Jakarta Barat
- Lincoln Arsyad, 1999, **Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah**, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Marzuki, 1983, **Metodologi Riset**, Cetakan Ketiga, BPFE UII, Yogyakarta.
- Prapto Yuwono, 1999, **Suatu Pengantar Ekonometrika**, cetakan 1, Jakarta : LP3ES.
- Richardson, Harry W, 1977, **Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional**, Terjemahan Paul Sitohang, Jakarta : LP3ES

- Riya Suharnata, 1989, **Pengaruh Deregulasi PMA dan PMDN terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, 1981, **Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Kebijakan)**, Medan : Borta Gorat
- , 1997, **Pengantar Teori Makro Ekonomi**, Edisi ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salvatore, Dominick. 1992, **Ekonomi Internasional**, Erlangga, Jakarta
- Samsubar Saleh, 1990, **Statistik Deskriptif**, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sunyoto Sastrowardoyo, 1994, **Kebijakan Dalam Menghadapi Perkembangan Perusahaan Multinasional Di Indonesia**, Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi, Yogyakarta.
- Singgih Santoso, 2000, **SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional**, Edisi ke-2, PT. Elex Media Komputindo Gramedia Jakarta, Jakarta
- , 2000, **Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik**, PT. Elex Media Komputindo Gramedia Jakarta, Jakarta
- Soemitro Djojohadikusumo, 1994, **Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan**, Jakarta : LP3ES
- Sutrisno Hadi, 1987, **Analisis Regresi**, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Suyudi Mangunwiharjo, 1993, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Produk Domestik Bruto Regional Bruto Sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan di Jawa Tengah", **Media Ekonomi dan Bisnis** Vol. V, Nomor 2
- Tony Prasetyantono, 1995, **Agenda Ekonomi Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama & STIE YO, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P., 1984, **Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang**, Akademika Pressindo, Jakarta.